



**BUKU
REFERENSI**



STRATEGI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA

Dr. Ir. Arief Rachman, MM, MBA.

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA

PENULIS

Dr. Ir. Arief Rachman, MM, MBA.

EDITOR

Dr. Adi Bandonno, M.Pd

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA

Dr. Ir. Arief Rachman, MM, MBA.



STRATEGI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA

Edisi Pertama

Copyright @ 2023

ISBN 978-623-130-065-2

15,5 x 23 cm

108h.

cetakan ke-1, 24 Februari 2023

Penulis

Dr. Ir. Arief Rachman, MM., MBA.

Editor

Dr. Adi Bandonu, M.Pd

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

KATA PENGANTAR



**Dr. Ir. Arief Rachman, M.M., M.B.A.
Mayor Jenderal TNI (Purn)**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas segala galanya yaitu demi tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan, dimana untuk mewujudkannya perlu memperhatikan tiga kaidah pokok, yakni tata kehidupan, upaya pencapaian tujuan, serta sarana yang digunakan. Dalam rangka mewujudkan Kepentingan Nasional tersebut maka diperlukan strategi pertahanan negara yang dikelola secara tepat sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala macam bentuk ancaman.

Strategi pertahanan negara pada dasarnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang disertai pada keyakinan kekuatan sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Salah satu dari tugas pemerintah dalam mengelola pertahanan negara agar tetap kuat menjaga kedaulatan negara adalah mencakup segala upaya mengendalikan sistem ideologi negara dan sistem politik negara.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sistem pertahanan negara Indonesia memiliki tiga fungsi, yakni fungsi penangkalan, fungsi penindakan, dan fungsi pemulihan.

Buku tentang Strategi Pertahanan Negara Indonesia ini disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu agar para pembaca dapat memahami apa yang menjadi makna dan tujuan strategi pertahanan negara yang diterapkan sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. Buku referensi ini disusun dengan referensi yang telah dirancang dengan baik serta dilengkapi dengan sumber-sumber referensi lainnya yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan para pembaca buku ini memiliki pemahaman yang tepat tentang strategi pertahanan negara.

Dalam menyusun buku ini, penulis menggunakan prinsip-prinsip elaborasi dengan memperhatikan desain pesan, pemanfaatan teknologi komunikasi, dan berlandaskan pada teori belajar dan pembelajaran yang menekankan pada fleksibilitas pembelajaran dalam konteks ruang dan waktu yang mengoptimalkan pencapaian kompetensi kolaborasi sebagai bekal bekerjasama dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis, bila ada kritik dan saran dari pembaca akan kami terima dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga dapat diterbitkan buku ini. Semoga apa yang telah kami terima dari semua pihak, mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah Subhanahuwataala dan menjadi amal baik bagi kita semua, amin yarobbil'alam.

Jakarta, 24 Februari 2023

Penulis,

Dr. Ir. Arief Rachman, M.M., M.B.A.

Mayjen TNI (Purn)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar - i

Daftar Isi - iii

Bagian 1 Pertahanan Negara - v

- 1.1 Definisi Pertahanan Negara - 6
- 1.2 Kepentingan Nasional - 7
- 1.3 Hakikat Pertahanan Negara – 10
- 1.4 Tujuan Pertahanan Negara – 10
- 1.5 Sistem Pertahanan Negara – 12
- 1.6 Fungsi Pertahanan Negara - 12

Bagian 2 Hakikat Dan Penggolongan Ancaman - 17

- 2.1 Hakikat Penggolongan Ancaman - 18
- 2.2 Spektrum konflik – 23
- 2.3 Faktor-Faktor Sumber Ancaman - 23

Bagian 3 Kepentingan Strategis Pertahanan - 33

- 3.1 Kepentingan Strategis yang Bersifat Permanen - 34
- 3.2 Kepentingan Strategis yang Bersifat Mendesak - 35
- 3.3 Kepentingan Strategis di Bidang Kerjasama Pertahanan – 38

Bagian 4 Sasaran Strategis Pertahanan Indonesia - 41

- 4.1 Sasaran Strategis Pertahanan Indonesia – 42
- 4.2 Pertahanan Negara Untuk Menangkal Segala Bentuk Ancaman dan Gangguan – 42

Bagian 5 Landasan Pertahanan Negara - 47

- 5.1 Landasan Idiil – 48
- 5.2 Landasan Konstitusional - 49
- 5.3 Landasan Yuridis - 49
- 5.4 Landasan Historis – 50
- 5.5 Landasan Visional – 51
- 5.6 Landasan Konseptual – 51
- 5.7 Landasan Doktrinal – 52
- 5.8 Kepentingan Nasional Indonesia – 52
- 5.9 Keamanan Nasional Indonesia – 53

- 5.10 Sistem Pertahanan Semesta – 53
- 5.11 Geopolitik dan Geostrategi Indonesia – 54

Bagian 6 Doktrin Pertahanan Negara - 57

- 6.1 Hakikat Doktrin Pertahanan Negara - 58
- 6.2 Kedudukan dan Stratifikasi Doktrin Pertahanan Negara – 59
- 6.3 Doktrin Maritim Indonesia – 60

Bagian 7 Perjuangan Bangsa Indonesia - 67

- 7.1 Perjuangan Bangsa Indonesia - 68
- 7.2 Jati Diri Bangsa - 68
- 7.3 Hakikat Perjuangan Bangsa - 69
- 7.4 Cita-Cita Bangsa Indonesia – 69
- 7.5 Tujuan Nasional – 69
- 7.6 Kepentingan Nasional – 69
- 7.7 Penyelenggaraan Perdamaian – 70
- 7.8 Penyelenggaraan Peperangan – 72

Bagian 8 Kekuatan Pertahanan Negara -79

- 8.1 Sumber Daya Manusia - 80
- 8.2 Tanggap – 81
- 8.3 Tanggon – 83
- 8.4 Trengginas – 84
- 8.5 Manajemen Sumber Daya Pertahanan – 85

Bagian 9 Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pertahanan Negara -89

- 9.1 Penangkalan - 90
- 9.2 Menghadapi Ancaman Militer – 91
- 9.3 Menghadapi Ancaman Nirmiliter – 98
- 9.4 Pertahanan Militer Dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter Lintas Negara – 103

Daftar Pustaka – 105

Indeks – 106

Riwayat Hidup - 107

BAGIAN 1
PERTAHANAN
NEGARA



PERTAHANAN NEGARA

Pada bagian 1 tentang Pertahanan Negara ini, akan dijelaskan tentang: definisi pertahanan negara, kepentingan nasional, hakikat pertahanan negara, tujuan pertahanan negara, sistem pertahanan negara, dan fungsi pertahanan negara. Bagian ini mendeskripsikan tentang urgensi pertahanan negara dalam kerangka kepentingan nasional. Pertahanan negara perlu ditopang dan didukung oleh segenap elemen bangsa, sehingga mampu menangkal segala ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

1.1 Definisi Pertahanan Negara

Pertahanan negara adalah segala usaha yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan demikian, bagi pemerintah maka pertahanan negara memiliki kedudukan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera, dimana usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Sistem pertahanan negara yang di anut oleh Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Berdasarkan pasal 16 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Menteri Pertahanan berkewajiban menyusun buku putih pertahanan yang disebarluaskan kepada masyarakat domestik maupun internasional untuk menciptakan saling percaya dan meniadakan potensi konflik.

1.2 Kepentingan Nasional

Pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki kepentingan nasional yaitu tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Semuanya diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yakni *tata kehidupan, upaya pencapaian tujuan, serta sarana yang digunakan*. Dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia harus selalu mencerminkan kesatuan tata nilai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi kebhinekaan yang ditunjukkan dalam interaksi sosial yang harmonis. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional yang pelaksanaannya secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Adapun *sarana* yang digunakan dalam mewujudkan tujuan nasional adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Lingkungan strategis yang terus berkembang dalam suatu dinamika yang sangat tinggi menuntut penyesuaian diri dengan hakikat perubahan yang terjadi. Sehingga kepentingan nasional Indonesia disusun dalam tiga kategori kepentingan nasional yang bersifat mutlak, vital dan bersifat penting. Kepentingan nasional yang bersifat mutlak adalah tetap tegaknya NKRI. Fungsi pertahanan negara wajib menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari

segala bentuk ancaman. NKRI dengan wilayah terdiri atas 17.504 buah pulau sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus tetap dijaga keberadaan dan keutuhannya. Posisi Indonesia yang strategis memiliki implikasi pertahanan yang besar. Keutuhan wilayah NKRI tidak saja menjadi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga menjadi bagian strategis yang mempengaruhi kepentingan nasional sejumlah negara di dunia. Wilayah Indonesia yang utuh dan stabil akan menjadi syarat mutlak terselenggaranya pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat, sekaligus bagi terwujudnya stabilitas kawasan yang mengitari Indonesia.

Indonesia tidak akan membiarkan setiap usaha yang akan mengganggu eksistensi dan integritas NKRI. NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, merupakan keputusan final yang harus dijaga dan dipertahankan. Kepentingan nasional Indonesia yang bersifat vital menyangkut keberlanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika*, sejahtera, adil dan makmur, demokratis. serta Kondisi objektif Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia merupakan tantangan untuk mengembangkan pertahanan Indonesia ke depan. Dengan penduduk yang sudah mencapai lebih dari 272 juta jiwa, serta karakteristik yang sangat pluralistik dalam SARA, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk membangun kohesi nasional dalam ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Indikator terwujudnya kohesi nasional serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukkan dalam kehidupan sosial dan interaksi antar warga masyarakat yang harmonis.

Dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, konflik yang bersumber SARA berpotensi cukup besar dan menjadi tantangan bagi perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa. Akar masalah yang menjadi penyulut konflik yang bernuansa SARA adalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Persatuan dan kesatuan bangsa tidak terwujud dengan sendirinya. Kehidupan masyarakat yang harmonis hanya dapat terwujud melalui usaha yang bersifat menyeluruh dan menyentuh aspek kesejahteraan, yakni pendidikan, peningkatan taraf hidup, serta aspek penegakan hukum yang diberdayakan secara maksimal untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pluralistik bangsa Indonesia harus dapat dikelola secara sungguh-sungguh dalam

suatu pendekatan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia yang sejahtera, adil, dan berdaya saing.

Kepentingan nasional Indonesia yang utama adalah kepentingan yang terkait dengan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Lingkungan strategis Indonesia adalah regional dan global dengan segala dinamikanya. Indonesia juga tidak terlepas dari limpahan sejumlah konflik di dunia. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap mengambil peran aktif bersama-sama dengan bangsa lain melalui usaha-usaha yang bermartabat untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada saat ini masih terdapat beberapa kawasan di dunia yang masih dilanda konflik, baik konflik antarnegara maupun konflik internal.

Penggunaan kekuatan militer untuk memaksakan perdamaian hanya dapat menyelesaikan permasalahan di atas permukaan dan sesaat, tetapi menimbulkan efek penderitaan jangka panjang yang bersifat multidimensi terhadap suatu bangsa. Indonesia melalui Dewan Keamanan PBB akan mendorong usaha-usaha penyelesaian damai terhadap setiap konflik dan mencegah penggunaan kekuatan untuk memaksakan perdamaian.

Selain itu, sebagai anggota Gerakan Non-Blok, yang sekaligus anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia memainkan peran dalam peningkatan kerja sama dengan negara-negara anggota lainnya yang berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing, maupun pencegahan dan resolusi konflik secara damai dan bermartabat. Pada lingkup regional, peran Indonesia sebagai anggota ASEAN, dalam upaya untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman, stabil dan sejahtera menjadi modalitas dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam rangka itu kerja sama bilateral dengan sesama anggota ASEAN sangat penting untuk dikembangkan secara lebih konkret dan menyentuh permasalahan-permasalahan yang nyata-nyata dihadapi. Dalam kerangka itu, perwujudan tiga pilar ASEAN, yakni masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat budaya ASEAN dan masyarakat keamanan ASEAN, menjadi komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkannya secara bersama oleh seluruh anggota ASEAN bagi masa depan ASEAN yang lebih baik dan berdaya saing.

Terwujudnya tiga pilar ASEAN tersebut akan mempromosikan stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara yang memberikan efek

positif bagikawasan lain dan dunia. Bersamaan dengan usaha mewujudkan tiga pilar ASEAN, penguatan hubungan dengan negara lain dalam kerangka ASEAN Plus Enam dan Forum Regional ASEAN (ARF) sangatlah penting. Bersama dengan negara-negara mitra ASEAN yang umumnya mempunyai pengaruh besar pada kawasan dan dunia, akan terwujud suatu sinergi yang memberikan efek bagi percepatan tercapainya stabilitas dan keamanan Asia Tenggara, sekaligus mempromosikan stabilitas dan keamanan Asia Pasifik.

1.3 Hakikat Pertahanan Negara

Pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan strategis bukan karena alasan ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang modern. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.

1.4 Tujuan Pertahanan Negara

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakupi upaya untuk menjaga sistem

ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Setiap usaha untuk mengganti ideologi Pancasila akan berhadapan dengan instrumen pertahanan negara yang setiap saat siap sedia membela dan mempertahankannya, sedangkan dalam menjaga sistem politik negara, upaya Pertahanan Negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa serta mengandung tata nilai. Pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional dengan baik.

Sebaliknya, pemerintahan yang tidak stabil tidak saja mengganggu kelancaran pembangunan nasional, bahkan dapat mengakibatkan masa depan Indonesia menjadi tidak menentu. Tata nilai bangsa Indonesia terangkum dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta bukan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap gangguan yang berdimensi SARA, demokrasi, HAM, dan tindakan perusakan lingkungan hidup juga menjadi urusan pertahanan negara.

Upaya menjaga keutuhan NKRI didasarkan pada pandangan bangsa Indonesia yang menempatkan NKRI sebagai putusan final yang harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Setiap usaha pemisahan diri atau yang bertujuan mengubah dan memecah belah NKRI merupakan ancaman yang akan dihadapi dengan sistem pertahanan negara. Menjamin keselamatan bangsa merupakan hal fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara untuk melindungi warga dari segala bentuk ancaman. Upaya menjamin keselamatan bangsa mencakup pula upaya pertahanan negara dalam menghadapi setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dimensi keselamatan bangsa juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan penanggulangan dampak bencana alam, kerusakan sosial, mengatasi tindakan terorisme, ancaman keamanan lintas negara serta penegakan keamanan di laut dan udara Indonesia.

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan strategis pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam menjamin tegaknya NKRI dengan segala kepentingannya. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk

mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

1.5 Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional.

Pertahanan yang efektif adalah pertahanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai di mana kehidupan masyarakat berjalan secara normal, dan hubungan dengan sesama negara baik di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai. Menurut UU RI Pasal 1 No 3 Tahun 2002, Sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh TNI meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil.

1.6 Fungsi Pertahanan Negara

Sistem pertahanan negara Indonesia memiliki tiga fungsi, yakni fungsi penangkalan, fungsi penindakan, dan fungsi pemulihan. *Fungsi penangkalan* merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mencegah atau meniadakan niat dari pihak tertentu yang ingin menyerang Indonesia.

Di dalam buku Strategi Pertahanan Negara (Kementerian Pertahanan RI, 2007) disebutkan bahwa pada konsep penangkalan terdapat dua macam strategi penangkalan, yaitu penangkalan dengan cara penolakan dan penangkalan dengan cara pembalasan. Fungsi penangkalan dilaksanakan dengan strategi penangkalan yang bertumpu pada instrumen penangkalan berupa instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi, dan militer.

Instrumen politik menempatkan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara, bersinergi dengan faktor-faktor politik lainnya yang saling memperkuat. Instrumen ekonomi melalui pertumbuhan yang sehat dan cukup tinggi akan mewujudkan pencapaian tujuan nasional, yakni masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta berdaya saing pada lingkup regional maupun global. Instrumen psikologis yang diemban oleh semua komponen pertahanan dalam mengembangkan kemampuan dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan media komunikasi, teknologi, serta faktor-faktor psikologis lainnya bagi terwujudnya daya tangkal psikologis secara efektif.

Psikologis berintikan faktor-faktor nonfisik berupa tata nilai serta segenap pranata sosial yang didayagunakan dalam mewujudkan motivasi, tekad, dan jiwa juang. Instrumen teknologi dibangun secara bertahap dan berlanjut melalui pengembangan industri pertahanan dalam negeri bagi terwujudnya kemandirian dalam penyediaan alat utama sistem persenjataan yang berdaya saing dengan produk-produk negara lain. Instrumen militer, yakni TNI sebagai Komponen Utama pertahanan negara harus mampu mengembangkan strategi militer dengan efek dayatangkal yang tinggi, serta profesional dalam melaksanakan setiap tugas operasi, baik OMP maupun OMSP.

Fungsi penindakan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mempertahankan, melawan, dan mengatasi setiap tindakan militer suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keselamatan bangsa dari segala ancaman. Fungsi penindakan dilaksanakan melalui tindakan preemtif, perlawanan, sampai dengan mengusir musuh keluar dari wilayah Indonesia. Tindakan preventif merupakan bentuk penindakan terhadap pihak lawan yang nyata-nyata akan menyerang Indonesia dengan cara mengerahkan kekuatan pertahanan untuk melumpuhkan pihak lawan yang sedang dalam persiapan untuk menyerang Indonesia. Tindakan preventif dilaksanakan di wilayah pihak lawan atau di dalam perjalanan sebelum memasuki wilayah Indonesia.

Tindakan perlawanan merupakan bentuk penindakan terhadap pihak lawan yang sedang menyerang Indonesia atau telah menguasai sebagian atau seluruh wilayah Indonesia dengan cara mengerahkan seluruh kekuatan negara baik secara militer maupun nirmiliter. Tindakan perlawanan diselenggarakan dengan sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta melalui pengerahan kekuatan pertahanan yang berintikan TNI didukung oleh segenap kekuatan bangsa dalam susunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Fungsi Pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara militer maupun nirmiliter, untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu sebagai akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, atau serangan separatis, konflik vertikal atau horizontal, huru-hara, serangan teroris, atau bencana alam. TNI bersama dengan instansi pemerintahan lainnya serta masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta yang utuh.

RANGKUMAN

1. Pertahanan negara adalah segala usaha yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki kepentingan nasional yaitu tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
3. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
4. Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
5. Sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
6. Sistem pertahanan negara Indonesia memiliki tiga fungsi, yakni fungsi penangkalan, fungsi penindakan, dan fungsi pemulihan.

BAGIAN 2
HAKIKAT DAN
PENGGOLONGAN
ANCAMAN



HAKIKAT DAN PENGGOLOGAN ANCAMAN

Pada bagian 2 ini dijelaskan tentang Hakikat dan Penggolongan Ancaman, yang mencakup: hakikat penggolongan ancaman, spektrum konflik, dan faktor-faktor sumber ancaman. Pada dasarnya ancaman di era global semakin kompleks dan tidak menentu. Asal ancaman bisa dari dalam maupun luar negeri, secara vertikal maupun horisontal, militer maupun nirmiliter. Setiap ancaman yang sewaktu-waktu muncul membutuhkan antisipasi dan kesiapan dari segenap elemen dan komponen bangsa untuk menghadapinya.

2.1 Hakikat Penggolongan Ancaman

Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Terdapat berbagai definisi ancaman dalam kaitannya dengan pertahanan maupun keamanan negara. Dalam kajian hubungan internasional (*international relations studies*), beberapa teori menjelaskan mengenai definisi ancaman tersebut. Menurut Buzan dan Waever (1998), ancaman dalam kerangka keamanan sosial terbagi menjadi dua, ancaman horisontal dan ancaman vertikal. Ancaman horisontal yaitu beberapa identitas yang saling bersaing dalam suatu kelompok sosial. Sementara, ancaman vertikal yaitu ancaman yang mengakibatkan identitas suatu kelompok sosial melemah pada titik terjadinya disintegrasi atau secara nyata terkekang oleh suatu kekuatan politik. Kedua hal ini mengakibatkan terjadinya konflik horisontal maupun vertikal.

Sementara menurut Craig A. Snyder (1999), definisi ancaman dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, *strategic studies* dan *security studies*. Menurut *strategic studies* ancaman yaitu ancaman militer yang ditujukan terhadap suatu negara, sementara menurut *security studies*, ancaman yaitu ancaman non militer yang bukan saja ditujukan terhadap negara, namun juga terhadap non-state actors maupun sub-state groups. Definisi ancaman juga dapat dilihat dengan jelas dalam Bab I Pasal 1 ayat 22

Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di mana disebutkan bahwa ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jika dilihat dari beberapa definisi mengenai ancaman tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang umum (*common factors*) dari ancaman. Pertama, ancaman ditujukan terhadap negara/kelompok sosial dan kedua, ancaman terhadap identitas negara/kelompok tersebut (termasuk terhadap bangsa/anggota kelompok sosial tersebut). Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

1. Ancaman Militer

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Invasi berlangsung secara eskalatif, mulai dari kondisi politik yang terus memburuk, diikuti dengan persiapan-persiapan kekuatan militer dari negara yang akan melakukan invasi.

Bentuk lain dari ancaman militer yang peluangnya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain. Pemberontakan bersenjata merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup atau tersamar.

Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia merupakan ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan (DI/TII, PRRI, Permesta, Kahar Muzakar, serta G-30-S/PKI). Aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi mengancam tegaknya NKRI yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Aksi sabotase terhadap objek vital nasional dan instalasi strategis yang didukung kemajuan Iptek yang dimanfaatkan lawan untuk merancang ancaman sehingga memiliki intensitas yang lebih tinggi dan kompleks.

Kegiatan spionase secara tertutup dengan menggunakan kemajuan Iptek sulit dideteksi, perlu penanganan khusus (kontraspijase) untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan pihak lawan. Aksi teror bersenjata merupakan kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa, menebarkan rasa ketakutan mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal perikemanusiaan. Sasarannya dapat menimpa siapa saja, sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya hubungan dengan jaringan teroris internasional, terutama jaringan teroris yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain, penangkapan ikan secara ilegal, pencurian kekayaan di laut, termasuk pencemaran lingkungan.

Konflik komunal merupakan gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antarkelompok masyarakat. Dalam skala yang besar dapat membahayakan keselamatan bangsa sehingga tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa dengan mengedepankan pendekatan penegakan hukum belaka dan ditujukan untuk mencegah merebaknya konflik yang dapat mengakibatkan risiko yang lebih besar.

2. Ancaman Nirmiliter

Ancaman nirmiliter pada hakikatnya menggunakan faktorfaktor nirmiliter yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

- a. Ancaman Berdimensi Ideologi. Ancaman ideologi komunis merupakan bahaya laten yang harus diperhitungkan, walaupun secara global tidak populer lagi. Bentuk-bentuk baru ancaman ideologi yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri,

- yakni metamorfosis dari penganut paham komunis yang telah melebur ke dalam elemen-elemen masyarakat.
- b. Ancaman Berdimensi Politik Dari luar negeri. Ancaman dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik. Intimidasi, provokasi atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering digunakan untuk menekan negara lain. Politik merupakan instrumen utama yang dapat menjadi penentu damai atau perang, yakni bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Ancaman berdimensi politik yang berasal dari luar dapat dilakukan oleh aktor negara dan aktor bukan negara dengan menggunakan isu-isu global sebagai kendaraan untuk menyerang atau menekan Indonesia.
 - c. Ancaman Berdimensi Ekonomi. Ekonomi menjadi alat stabilitas dalam negeri, merupakan salah satu penentu posisi tawar negara dalam hubungan antarnegara atau pergaulan internasional. Negara dengan perekonomian lemah sering kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang ekonominya lebih kuat. Ekonomi yang kuat biasanya diikuti dengan politik dan militer yang kuat. Ancaman berdimensi ekonomi berpotensi menghancurkan pertahanan negara, dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Ancaman internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi, sedangkan secara eksternal dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing.
 - d. Ancaman Berdimensi Sosial. Budaya Ancaman berdimensi sosial budaya datang dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam didorong isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia, lama kelamaan menjadi “kuman penyakit” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme.

Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang, seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat, menjadi pendorong konflik-konflik antar masyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat, dan daerah. Konflik horizontal berdimensi SARA timbul akibat watak kekerasan yang sudah melekat, mendorong tindakan kejahatan termasuk perusakan lingkungan dan bencana buatan manusia. Faktor-faktor tersebut berproses meluas menghasilkan efek domino sehingga melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung mengakibatkan daya dukung dan kondisi lingkungan hidup yang terus menurun. Merebaknya wabah pandemi, seperti flu burung, demam berdarah, HIV/AIDS dan malaria merupakan tantangan serius. Ancaman dari luar bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri sulit dibendung yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Terjadinya transfer informasi, transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta dan sulit dikontrol, terjadi benturan peradaban, lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak oleh nilai-nilai individualisme. Fenomena lain adalah konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, di samping konflik horizontal berdimensi etnoreligius masih patut diperhitungkan.

- e. Ancaman Berdimensi Teknologi dan Informasi. Kemajuan Iptek membawa akibat semakin berkembang pula kejahatan yang memanfaatkan kemajuan tersebut, antara lain kejahatan cyber dan perbankan. Lambatnya perkembangan Iptek di Indonesia menyebabkan semakin tinggi ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk-produk negara lain, lebih dari itu, sulit untuk mengendalikan ancaman berpotensi teknologi oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia. Tantangan yang dihadapi berupa ancaman teknologi dari luar negeri, juga pola sikap masyarakat dalam menghargai karya-karya teknologi anak bangsa.
- f. Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum. Bencana merupakan ancaman keselamatan umum yang terjadi murni misalnya gempa

bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Bencana yang disebabkan manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, secara langsung maupun kronis (menahun), misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Bencana alam yang disebabkan faktor alam yang dipicu manusia, antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lainnya, yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat.

2.2 Spektrum Konflik

Konflik adalah kondisi terganggunya hubungan antarnegara yang berkembang dalam spektrum negatif paling rendah hingga paling tinggi berupa perang terbuka. Konflik dapat terjadi di dalam negeri, terutama pada tingkat provinsi atau lokal, yakni yang melibatkan dua kelompok masyarakat atau lebih. Pemahaman terhadap spektrum konflik menjadi dasar dalam pencegahan konflik, pengelolaan konflik, keikutsertaan dalam tugas-tugas perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan, serta bantuan kemampuan pertahanan negara pada departemen atau otoritas sipil lainnya.

Dalam spektrum ancaman yang eskalatif dan berkembang ke arah yang mengancam keamanan nasional, diperlukan mekanisme pelibatan unsur-unsur kekuatan nasional secara tepat, dikelompokkan dalam dua pendekatan fungsi, yakni fungsi pertahanan nirmiliter dan militer. Ketika spektrum ancaman masih berupa konflik intensitas rendah, penanganannya mengedepankan pendekatan fungsional, yang dalam dimensi pertahanan diperankan oleh fungsi pertahanan nirmiliter.

Fungsi pertahanan militer mengambil peran sebagai unsur bantuan bila diperlukan unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yaitu menghadapi konflik intensitas rendah, seperti pemberontakan bersenjata, konflik komunal yang meluas, kerusuhan yang berlarut dan dalam skala besar yang mengganggu keamanan publik, serta kelangsungan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, pelibatan fungsi pertahanan militer diperlukan. Pelibatan fungsi pertahanan militer (TNI) dalam konteks ini merupakan lingkup pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP).

Dalam penanganan ancaman atau gangguan keamanan nasional di suatu wilayah atau daerah yang penanganannya dengan cara-cara biasa atau secara fungsional tidak efektif lagi, bahkan diperkirakan akan menimbulkan

korban yang besar atau kerusakan infrastruktur dan properti yang parah, atas putusan politik pemerintah fungsi pertahanan militer dilibatkan. Apabila ancaman meningkat dan berkembang ke arah situasi yang gawat dan status keamanan bergeser dari Tertib Sipil menjadi Darurat Sipil, keterlibatan fungsi pertahanan militer, yakni TNI, semakin besar, dalam kerangka pelaksanaan OMSP. Dalam keadaan Darurat Militer, demi kepentingan nasional dan efektivitas pelaksanaan penanganan darurat militer sebagaimana diatur oleh undang-undang, fungsi-fungsi pertahanan nirmiliter dapat dialihkan sementara kepada TNI selama pemberlakuan darurat militer.

2.3 Faktor-faktor Sumber Ancaman

Menurut Edy Prasetyono, sumber ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal:

1. Lingkungan Internal.

Perkembangan domestik masih menunjukkan beberapa ketidakpastian baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Pemulihan ekonomi diperkirakan masih menghadapi beberapa kendala antara lain karena lemahnya iklim investasi, pertumbuhan ekspor yang lamban, dan ketidakpastian hukum dan politik. Jumlah pengangguran dan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat besar. Masalah-masalah ini tidak hanya mengurangi kinerja ekonomi, tetapi juga akan melahirkan ketidakstabilan di kalangan masyarakat akar rumput. Kenaikan BBM yang mencapai lebih dari 100 persen makin memperburuk keadaan di atas.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga berkurang. Gejala ini tampaknya akan terus berlangsung. Kelemahan ekonomi dan keuangan negara adalah salah satu penyebab utama dari keadaan ini. Selain itu, pelembagaan politik untuk membangun sistem politik yang demokratis juga masih akan menghadapi berbagai persoalan. Hubungan lembaga-lembaga negara, terutama antara eksekutif dan legislatif tampaknya belum akan mampu melahirkan sistem checks and balances yang stabil.

Negara juga akan dihadapkan pada tuntutan-tuntutan baru daerah dalam proses desentralisasi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan masalah-masalah distribusi sumber-sumber ekonomi antara pusat dan daerah akan memperkuat tuntutan-tuntutan seperti itu. Proses ini akan

memakan waktu yang lama. Masalah-masalah di atas melahirkan tantangan terhadap proses reformasi politik di Indonesia. Hakekatnya adalah bahwa politik, baik pelaku maupun proses pelembagaannya, masih menghadapi krisis legitimasi, tidak hanya dalam konteks hubungan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), melainkan juga dalam hubungan antara sipil dan militer (*civil-military relations, CMR*).

Hubungan sipil militer yang menundukkan institusi militer di bawah otoritas politik sebagai syarat pembangunan sistem politik yang demokratis masih sering dipahami secara salah. Bermainnya kepentingan-kepentingan kekuasaan dan ekonomi, baik kelompok politik sipil dan militer, menjadikan reformasi hubungan sipil-militer masih akan memakan waktu yang lama. Masalahnya menjadi makin rumit karena para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam masalah hubungan sipil-militer tidak menjadikan masalah ini sebagai agenda politik nasional. Persoalan-persoalan di atas, yaitu menurunnya kemampuan negara, krisis ekonomi, ketidakadilan, ketidakpastian transisi politik, dan masalah hubungan sipil militer, menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi masalah-masalah keamanan dalam negeri yang serius.

Ancaman kedua yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah konflik komunal dan gerakan separatis. Konflik komunal lahir tidak hanya karena perbedaan nilai dan budaya, tetapi yang lebih mendasar adalah karena entitas/masyarakat tidak mampu menemukan bentuk interaksi yang lebih tinggi untuk mengatasi ikatan komunal mereka. Masalah ini makin runyam karena masyarakat tidak merasakan kehadiran negara dan bentuk-bentuk ikatan politik dan ekonomi ke mana mereka memberikan loyalitas. Proses politik selama krisis ini tidak mampu mentransformasi konflik-konflik komunal ke dalam bentuk interaksi sosial politik yang terlembaga.

Banyak faktor menjelaskan munculnya separatisme yaitu sejarah, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, dan perasaan dimarginalkan oleh sistem politik dan ekonomi. Masalah ini akan makin rumit karena globalisasi dan keterbukaan menjadikan mereka yang terlibat mempunyai ruang lebih bebas untuk bergerak ke luar batas nasional. Sumber-sumber ekonomi dan finansial menjadi lebih luas dengan adanya kemampuan untuk membentuk jaringan- jaringan internasional yang memberikan mereka akses persenjataan dan dukungan eksternal, baik potensi dukungan resmi, maupun melalui kegiatan-kegiatan ilegal misalnya penyelundupan senjata, obat terlarang, dan kegiatan terorisme.

Bentuk ancaman ketiga yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah kerusuhan sosial. Ini akan lahir ketika masyarakat menemui jalan buntu untuk mengatasi krisis, terutama ekonomi dan sosial. Dalam situasi krisis, di mana negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bersamaan dengan itu lembaga dan proses politik kehilangan legitimasi, potensi kerusuhan sosial merupakan potensi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Potensi kerusuhan sosial juga dapat memanfaatkan kerawanan hubungan-hubungan ikatan primordial, terutama agama, yang sangat mudah dimanipulasi. Akhir-akhir ini rasa aman dalam hubungan keagamaan mulai terusik.

Ancaman lain yang juga akan dihadapi adalah terorisme. Dalam kurun waktu 3-4 tahun terjadi serangan bom teroris dalam skala besar. Terorisme yang berkembang di Indonesia mempunyai akar kuat di dalam negeri Indonesia baik karena sejarah, ideologi-politik, lemahnya penegakkan hukum, dan tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Keberhasilan jaringan terorisme internasional masuk ke Indonesia lebih banyak ditentukan oleh masalah-masalah domestik di atas.

Faktor lain adalah krisis ekonomi dan politik yang memberikan ruang bagi kelompok teroris untuk memberikan jalan alternatif dan mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap negara. Selain itu, ketidakmampuan negara untuk melakukan kontrol terhadap beberapa aspek yang dengan mudah bisa dimanfaatkan oleh jaringan terorisme, misalnya pengawasan terhadap arus manusia, wilayah maritim dan udara yang sangat terbuka. Yang tidak kalah penting adalah korupnya birokrasi dan aparat keamanan yang memudahkan jaringan teroris untuk menembus institusi-institusi dan perangkat-perangkat keamanan negara dan masyarakat.

2. Lingkungan Eksternal

Sementara itu aspek eksternal menunjukkan kecil kemungkinan terjadi perang konvensional antar negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang akan mengancam keamanan dan kepentingan Indonesia. Kemungkinan terjadinya invasi militer ke Indonesia juga sangat kecil. Secara ekonomi dan politik, perang dan invasi militer adalah pilihan yang mahal baik dilihat dari politik domestik maupun dalam hubungan antar bangsa yang akan makin saling tergantung (interdependensi) di mana kepentingan nasional hanya bisa dipenuhi melalui kerjasama internasional. Dalam situasi seperti itu negara dan bangsa akan dihadapkan pada pilihan yang terbatas

dalam menentukan kebijakan nasional mereka yang mempersempit kemungkinan lahirnya kebijakan luar negeri dan pertahanan yang agresif. Meskipun demikian, akan lahir tantangan-tantangan baru yang harus diperhatikan oleh Indonesia.

Pertama, Amerika Serikat (AS) masih akan mendominasi ekonomi dan politik dunia. Posisi AS dalam sistem internasional dewasa ini belum bisa ditandingi oleh kekuatan lain, bahkan oleh Uni Eropa, apalagi oleh kekuatan-kekuatan regional seperti Brasil, Argentina, Afrika Selatan, India, ASEAN, Jepang, dan China. Perilaku kekuatan-kekuatan ini belum mampu membentuk sistem internasional baru yang menantang supremasi AS. Dalam posisi seperti itu, perubahan kebijakan dan perilaku Amerika Serikat dipastikan akan mempengaruhi kepentingan Indonesia. Terlebih untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang merupakan kawasan sangat strategis bagi Amerika Serikat.

Kehadiran Amerika Serikat di kawasan sekitar Indonesia ini akan tetap menjadi kondisi obyektif dalam perumusan kebijakan keamanan dan pertahanan Indonesia. Masalah-masalah baru internasional, seperti terorisme, keamanan jalur perdagangan, dan masalah-masalah hak asasi manusia akan mewarnai perilaku Amerika Serikat terhadap Indonesia yang sekarang dan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan diperkirakan belum mampu sepenuhnya mengontrol perkembangan-perkembangan internasional dan domestik.

Kedua, harus juga dicermati bahwa perkembangan-perkembangan ke depan di kawasan Asia Pasifik mengindikasikan bahwa konflik akan lebih banyak berdimensi maritim. Atau, aspek maritim akan membuat konflik menjadi makin kompleks. Penyelundupan manusia, penyebaran aksi terorisme, kejahatan internasional yang lain akan banyak memanfaatkan dimensi laut, terutama di negara-negara yang kemampuan patroli dan pengawasan wilayah lautnya sangat lemah seperti Indonesia. Bahkan ada kaitan yang erat antara terorisme, separatisme, dan kejahatan transnasional yang lain dengan memanfaatkan atau mengeksploitasi jalur-jalur laut di wilayah perairan Indonesia, sehingga mereka bisa bergerak dengan bebas untuk memasuki Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keamanan laut tidak hanya strategis dalam hubungan dan politik internasional, melainkan juga strategis bagi keamanan domestik.

Kepentingan negara-negara di kawasan juga akan lebih banyak lahir dari lingkungan maritim, mulai dari perlindungan terhadap jalur

komunikasi laut (*SLOC, Sea Lanes of Communication*) dan jalur perdagangan laut (*SLOT, Sea Lanes of Trade*) yang vital bagi perdagangan internasional, jalur pemasok energi, dan ekonomi. Selain itu dimensi maritim juga akan memberikan pilihan-pilihan strategis bagi negara-negara di kawasan ini untuk memproyeksikan kemampuan mereka ke luar batas nasional. Hal ini dilakukan misalnya dengan peningkatan kemampuan patroli atas wilayah laut baik wilayah yurisdiksi maupun wilayah ZEE dan jalur-jalur perdagangan, maupun dengan meningkatkan kekuatan pertahanan dengan prioritas angkatan laut dan udara. Dalam suatu kawasan yang berdimensi maritim sangat kuat, maka hanya negara yang membangun kekuatan maritim yang akan banyak mengendalikan percaturan politik dan strategis di kawasan ini.

Dengan demikian, meskipun upaya untuk memperkuat kekuatan maritim oleh negara-negara Asia Pasifik belum sampai pada tahap persaingan untuk meraih supremasi laut, kecenderungan ke depan tampak jelas bahwa keamanan maritim akan menjadi agenda dan sekaligus masalah yang membentuk kebijakan keamanan dan pertahanan negara-negara di kawasan ini.

Ketiga, dalam sistem internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat, kuatnya globalisasi yang membuka kesempatan untuk bersaing, dan kecenderungan pengembangan kekuatan maritim inilah munculnya Cina sebagai kekuatan regional dan global harus dilihat dengan perhitungan yang matang. Artinya, Cina sedang dan akan hadir sebagai tantangan dan sekaligus peluang. Indonesia akan dihadapkan pada dinamika hubungan Cina-Amerika Serikat yang akan ditandai oleh kuatnya upaya Cina untuk menyejajarkan diri dalam kelompok negara besar di kawasan terutama Jepang dan India, mampu bersaing dengan Amerika Serikat, mampu membentuk agenda keamanan dan politik di kawasan Asia Pasifik, dan mampu memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi nasionalnya yang makin mengandalkan pada keterbukaan ekonomi internasional dan globalisasi.

Hampir dapat dipastikan bahwa untuk tujuan-tujuan tersebut Cina akan membuat kebijakan-kebijakan keamanan yang memungkinkannya mempunyai banyak pilihan-pilihan strategis. Oleh karena itu dapat dipahami Cina makin asertif dalam kebijakan luar negerinya yang ditopang dengan pengembangan kekuatan angkatan laut dan udara. Di bidang ekonomi, Cina makin membuka diri dan sekaligus mengikatkan diri dalam

kerjasama ekonomi internasional. Cina yang akan datang adalah Cina yang baru yang lebih dinamis, terbuka, dan asertif yang akan hadir di kawasan sekitar Indonesia. Sebaliknya, Cina yang gagal sebagai negara yang mengalami transformasi besar baik dalam politik domestik dan internasional, juga merupakan skenario yang tidak dapat dikesampingkan.

Bahaya disintegrasi dan kesenjangan pusat-daerah, lahirnya gap besar antara kelas menengah baru akibat kemajuan ekonomi dengan masyarakat pedesaan, dan tuntutan demokratisasi yang makin besar akan menjadi tes bagi kelangsungan sistem politik komunis Cina. Tuntutan ini akan menjadi makin kuat karena membiarkan berjalannya sistem ekonomi dan sistem politik yang berbeda justru menciptakan bom waktu perubahan drastis dan tak terkendali. Jika ini terjadi, dipastikan akan terjadi gelombang manusia dan ketidakstabilan kawasan.

Meskipun skenario ini kecil kemungkinan terjadi, resiko besar yang harus dihadapi oleh Cina dan negara-negara di kawasan menyebabkan perlu kehati-hatian dalam berhubungan dengan Cina, menekankan perlunya transparansi kebijakan, dan jika perlu kompromikompromi tertentu. Keempat, melemahkan batas fisik nasional membuka ruang berkembangnya jaringan kejahatan trans-nasional. Para pelakunya dapat bergerak relatif bebas terutama di kawasan yang sangat terbuka. Di kawasan Asia Tenggara, hampir semua kejahatan trans-nasional berhasil mengeksploitasi keterbukaan dimensi maritim di kawasan, mulai dari penyelundupan manusia, perdagangan obat terlarang, terorisme, dan penyeludupan senjata ringan. Kerugian ekonomi dan politik keamanan yang ditimbulkan oleh kejahatan trans-nasional sangat besar. Kejahatan trans-nasional akan melahirkan konflik-konflik baru tidak hanya antara negara, melainkan juga antara negara dengan aktor bukan negara (*non-state actors*) yang melampaui batas-batas kedaulatan nasional.

Melihat perkembangan-perkembangan saat ini, kecenderungan ke depan menunjukkan bahwa kejahatan trans-nasional akan menjadi lebih besar karena di dalamnya terdapat peluang yang lebih besar bagi para pelaku untuk memenuhi kepentingan-kepentingan mereka melalui beragam interaksi dan saluran. Ini sangat fundamental karena dalam globalisasi negara bukan lagi satu-satunya aktor atau entitas politik yang dapat menuntut loyalitas tunggal dan memenuhi kepentingan warganya. Pelaku bukan negara (*non-state actors*) mempunyai banyak pilihan yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh negara. Akibatnya, kejahatan trans-nasional

menjadi kecenderungan kuat saat ini dan di masa depan.

Lingkungan Internal Perkembangan domestik masih menunjukkan beberapa ketidakpastian baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Lingkungan eksternal menunjukkan kecil kemungkinan terjadi perang konvensional antar negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang akan mengancam keamanan dan kepentingan Indonesia. Kemungkinan terjadinya invasi militer ke Indonesia juga sangat kecil.

RANGKUMAN

1. Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa.
2. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.
3. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.
4. Pemahaman terhadap spektrum konflik menjadi dasar dalam pencegahan konflik, pengelolaan konflik, keikutsertaan dalam tugas-tugas perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan, serta bantuan kemampuan pertahanan negara pada departemen atau otoritas sipil lainnya.
5. Sumber ancaman bisa datang dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

BAGIAN 3
KEPENTINGAN STRATEGIS
PERTAHANAN



KEPENTINGAN STRATEGIS PERTAHANAN

Pada bagian 3 ini dijelaskan tentang Kepentingan Strategis Pertahanan, yang mencakup: kepentingan strategis pertahanan yang bersifat permanen, kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak, dan kepentingan strategis pertahanan bidang kerja sama pertahanan. Kepentingan strategis menjadi acuan bagi Pemerintah untuk membuat skala prioritas kebutuhan-kebutuhan strategis pertahanan apa saja yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

3.1 Kepentingan Strategis yang Bersifat Permanen

Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif aktif, yang mengandung pengertian bahwa pertahanan negara tidak ditujukan untuk melancarkan agresi terhadap negara lain, namun secara aktif menangkal, mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang ditujukan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Strategi Pertahanan Negara disusun untuk menghadapi segala ancaman terhadap pertahanan negara, baik yang bersifat militer maupun bersifat nonmiliter sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berdasarkan perkiraan ancaman serta kepentingan nasional Indonesia, kepentingan strategis pertahanan negara meliputi kepentingan strategis yang bersifat permanen, mendesak dan bidang kerja sama pertahanan.

Kepentingan strategis pertahanan negara yang bersifat permanen adalah perwujudan satu kesatuan pertahanan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Kepentingan strategis tersebut dicapai melalui usaha membangun dan membina daya tangkal negara dan bangsa

serta kemampuan menanggulangi setiap ancaman yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, langsung atau tidak langsung.

Pertahanan Indonesia dipersiapkan sejak dini dengan sistem pertahanan, tanpa mempermasalahkan ada atau tidaknya ancaman nyata. Dalam melaksanakan kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, senantiasa memegang prinsip sebagai bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Prinsip cinta damai diwujudkan dalam pergaulan internasional yang bebas aktif serta hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lain. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya merupakan jalan terakhir setelah usaha-usaha diplomatik ditempuh dan mengalami jalan buntu. Dalam rangka menjamin kepentingan yang bersifat permanen, penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Semesta, yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan.

3.2 Kepentingan Strategis yang Bersifat Mendesak

Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat permanen, yakni terselenggaranya pertahanan negara untuk merespons setiap bentuk ancaman nyata maupun potensial. Kepentingan strategis yang bersifat mendesak mencakup kewajiban dan komitmen Indonesia untuk ikut aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia dan regional. Dari dinamika interaksi dengan bangsa-bangsa lain, serta implikasi dari perkembangan lingkungan strategis, terbentuk kondisi keamanan global, regional dan dalam negeri yang penuh ketidakpastian.

Fungsi pertahanan negara menyadari bahwa setiap isu keamanan harus segera diatasi agar tidak berkembang menjadi ancaman yang besar yang mengganggu eksistensi dan kepentingan NKRI. Wilayah Indonesia yang sangat luas menuntut pertahanan negara yang kuat yang mampu menjangkau secara maksimal seluruh wilayah. Wilayah Indonesia yang luas dan dapat dimasuki dari segala penjuru berimplikasi terhadap potensi ancaman yang cukup tinggi. Wilayah perairan dan dirgantara Indonesia menjadi salah satu fokus kepentingan pertahanan Indonesia yang mendesak. Potensi pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain cukup tinggi sehingga memerlukan kesiapsiagaan kekuatan pertahanan untuk dapat mencegah dan menangannya secara cepat dan tepat. Ancaman

sabotase, pembajakan, atau perompakan terhadap instalasi penting dan objek vital di laut semakin mendapat perhatian serius. Untuk itu, keunggulan kekuatan pertahanan yang berintikkan kekuatan TNI diselenggarakan untuk memberikan efek penolakan yang maksimal terhadap setiap usaha yang mengganggu stabilitas keamanan di laut.

Gelar kekuatan TNI diselenggarakan untuk memancarkan keunggulan kekuatan yang maksimal untuk memberikan efek penolakan terhadap aktivitas ancaman keamanan lintas negara yang berupa penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak serta barang-barang berbahaya dan terlarang lainnya. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut dan pembuangan limbah berbahaya masih terus berlangsung. Tindak kejahatan tersebut telah menguras kekayaan dan merugikan Indonesia dalam jumlah besar. Fungsi pertahanan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang lebih intensif untuk mencegah dan menanganinya. Dalam hal ini kerja sama dengan fungsi-fungsi lain di luar pertahanan perlu dikembangkan secara terpadu dan sinergi.

Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak juga diarahkan kepada pencegahan dan penanganan isu-isu ancaman dan gangguan berdimensi pertahanan, yang mencakupi ancaman separatistis, terorisme, aksi radikalisme yang membahayakan keselamatan dan kehormatan bangsa. Terhadap isu-isu keamanan tersebut penyelenggaraan pertahanan lebih mengedepankan fungsi pencegahan. Namun, kesiapsiagaan tetap dibangun sehingga pada waktunya dapat digerakkan ke tempat dan sasaran secara cepat. Dalam lingkup kepentingan yang bersifat mendesak, pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar menjadi salah satu prioritas fungsi pertahanan negara.

Pengamanan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan pelaksanaan fungsi pertahanan negara dalam menegakkan kedaulatan negara. Pada saat ini masih terdapat sejumlah segmen perbatasan, baik perbatasan darat maupun maritim, yang permasalahannya belum tuntas. Menegakkan kedaulatan NKRI adalah amanat segenap rakyat Indonesia untuk dilaksanakan melalui tindakan konkret, antara lain melalui kehadiran kekuatan pertahanan di wilayah-wilayah NKRI yang memerlukan pengamanan khusus, seperti wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Oleh karena itu, pemerintah masih menempatkan penanganan keamanan oleh TNI di wilayah-wilayah perbatasan dan penempatan pasukan TNI di pulau-pulau kecil terluar masih sebagai satu prioritas.

Wilayah perbatasan Indonesia darat maupun maritim membentang sangat panjang dan luas. Wilayah perbatasan maritim berbatasan dengan 10 negara. Wilayah perbatasan darat membentang sampai ribuan kilometer dan terbagi dalam tiga segmen, yakni di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta di Timor Barat yang berbatasan dengan Timor Leste. Tugas pengamanan terhadap pulau-pulau kecil terluar merupakan bagian dari kepentingan pertahanan yang mendesak. Indonesia memiliki 92 pulau kecil dan terluar; dari pulau-pulau kecil terluar tersebut, 12 di antaranya menjadi prioritas (Pulau Batek, Pulau Bras, Pulau Dana, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Marampit, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Nipa di Selat Singapura, Pulau Rondo, Pulau Sebatik dan Pulau Sekatung).

Gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan langkah untuk mendinamisasikan dan mengefektifkan pengamanan wilayah perbatasan. Kehadiran kekuatan di wilayah perbatasan sekaligus diarahkan untuk melaksanakan fungsi pembinaan teritorial dalam mendinamisasikan pelaksanaan bela negara untuk mewujudkan ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan. Tugas yang diemban satuan-satuan TNI yang digelar untuk mengamankan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar adalah tugas yang penuh tantangan. Khusus untuk perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar, karakteristik geografinya sangat sulit dijangkau dengan sarana transportasi biasa serta belum terjangkau sarana komunikasi. Wilayah tersebut pada umumnya merupakan daerah yang tertinggal dari segi pembangunan sehingga infrastruktur di wilayah tersebut sangat minim. Bahkan, pulau kecil terluar banyak yang tidak dihuni penduduk sehingga pasukan yang digelar di pulau-pulau tersebut sangat terisolasi dari interaksi dengan masyarakat.

Pada saat ini penanganan keamanan di wilayah perbatasan darat telah berjalan melalui gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan dengan Malaysia, yakni di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, yakni Provinsi Papua serta wilayah perbatasan dengan Timor Leste, yakni di Timor Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gelar kekuatan TNI juga telah dilaksanakan di pulau-pulau kecil terluar meskipun dari 92 pulau kecil terluar tersebut belum seluruhnya dapat ditempatkan Pos TNI, karena kondisi pulau yang sangat kecil yang rawan terhadap gelombang laut sehingga sangat tidak mungkin untuk

menempatkan kekuatan TNI, seperti di Pulau Dana (NTT) dan pulau kecil terluar lainnya.

Gelar kekuatan TNI tersebut memberikan efek penangkalan yang sangat besar. Kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar selain melaksanakan tugas pertahanan, dengan kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan di wilayah tersebut, telah ikut menggerakkan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang relatif terisolasi. Kegiatan pertahanan untuk mengamankan wilayah perbatasan maritim telah berjalan, antara lain melalui patroli TNI-AL dan TNI-AU secara periodik, memberikan efek penangkalan, sekaligus menurunkan tingkat ancaman keamanan lintas negara yang melalui jalur laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan dan perompakan.

Kepentingan strategis yang mendesak juga diarahkan untuk tugas-tugas bantuan, seperti penanggulangan dampak bencana alam, penanganan konflik komunal, serta tugas pencarian dan pertolongan (SAR). Dampak pemanasan global serta gejala alam lainnya berimplikasi terhadap potensi terjadinya bencana alam yang menjadi semakin tinggi. Dalam kondisi tersebut sektor pertahanan negara merupakan sektor yang paling siap untuk dikerahkan setiap saat.

3.3 Kepentingan Strategis di Bidang Kerja Sama Pertahanan

Indonesia mengembangkan pertahanan mandiri dalam pengertian tidak menyandarkan kepentingan pertahanan pada negara lain, tetapi menganut prinsip menjalin hubungan dengan negara lain melalui kerja sama pertahanan. Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia terus mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia. Kepentingan Indonesia di bidang kerja sama pertahanan dengan negara lain di waktu-waktu mendatang semakin penting ditingkatkan, seiring perkembangan isu-isu keamanan di lingkup regional dan global.

Pada lingkup regional, kepentingan pertahanan Indonesia adalah terwujudnya kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman dan stabil, bebas dari konflik antarsesama anggota kawasan. Indonesia adalah salah satu pemrakarsa Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama (TAC) yang perwujudannya sangat menentukan hubungan antaranggota ASEAN di bidang pertahanan. Substansi TAC adalah bahwa setiap anggota ASEAN sepakat untuk tidak saling menyerang dan menyelesaikan setiap konflik secara damai. Dalam kerangka itu, Indonesia akan selalu mendorong setiap

usaha bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai entitas yang solid, terutama dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks.

Indonesia menempatkan keamanan kawasan yang mengitari Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari kepentingan pertahanan Indonesia secara utuh. Indonesia tidak mungkin dapat tentram di kawasan yang kondisi keamanannya bergejolak. Kawasan yang tidak stabil selalu mengalirkan limbah persoalan keamanan, langsung maupun tidak langsung. Indonesia berdampingan dengan sejumlah negara, sesama anggota maupun di luar ASEAN. Stabilitas keamanan di negara-negara yang berdampingan dengan Indonesia menjadi prioritas perhatian. Kerja sama pertahanan telah mempererat hubungan Indonesia dengan banyak negara sesama kawasan maupun di luar kawasan. Berbagai bentuk kerja sama pertahanan telah mengangkat citra Indonesia di dunia internasional, yang dikembangkan melalui latihan militer bersama, patroli bersama, pertukaran informasi, penanganan bencana alam dan tugas perdamaian dunia. Indonesia menempatkan kerja sama pertahanan sebagai salah satu media yang efektif untuk membangun saling percaya dan agar hubungan antar negara terjalin dalam suasana yang lebih konkret.

RANGKUMAN

1. Kepentingan strategis pertahanan negara yang bersifat permanen adalah perwujudan satu kesatuan pertahanan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.
2. Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat permanen, yakni terselenggaranya pertahanan negara untuk merespons setiap bentuk ancaman nyata maupun potensial. Kepentingan strategis yang bersifat mendesak mencakup kewajiban dan komitmen Indonesia untuk ikut aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia dan regional.
3. Kepentingan strategis dibidang kerjasama pertahanan telah mempererat hubungan Indonesia dengan banyak negara sesama kawasan maupun di luar kawasan. Berbagai bentuk kerja sama pertahanan telah mengangkat citra Indonesia di dunia internasional, yang dikembangkan melalui latihan militer bersama, patroli bersama, pertukaran informasi, penanganan bencana alam dan tugas perdamaian dunia.

BAGIAN 4
SASARAN STRATEGIS
PERTAHANAN INDONESIA



SASARAN STRATEGIS PERTAHANAN INDONESIA

Pada bagian 4 ini menjelaskan tentang Sasaran Strategis Pertahanan Indonesia, yang mencakup: sasaran strategis pertahanan Indonesia dan alasan rasional diterapkannya sistem Pertahanan Negara dalam rangka menangkal segala bentuk ancaman dan gangguan. Sasaran strategis pertahanan Indonesia, meliputi: sasaran di bidang penangkalan, menghadapi ancaman agresi militer, mengatasi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer, mengatasi ancaman nirmiliter, serta dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

4.1 Sasaran Strategis Pertahanan Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan pertahanan negara, maka diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan Semesta, yang memadukan pertahanan militer dan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan semesta yang mandiri. Pengelolaan pertahanan negara secara mandiri bertitik tolak dari sikap bangsa Indonesia yang tidak menggantungkan diri pada negara lain. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut maka ditetapkan lima sasaran strategis yang saling terkait. Substansi kelima sasaran tersebut, mencakup: sasaran di bidang penangkalan, menghadapi ancaman agresi militer, mengatasi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer, mengatasi ancaman nirmiliter, serta dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

4.2 Pertahanan Negara untuk Menangkal Segala Bentuk Ancaman dan Gangguan

Kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkannya, maka pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan yang bersumber baik dari luar maupun dalam negeri. Konsepsi penangkalan Indonesia dibangun dan dikembangkan dengan pola Sistem Pertahanan Semesta yang memadukan pertahanan militer dan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Penerapannya

diwujudkan dalam pembangunan kekuatan serta penampilan segenap sumber daya nasional sebagai sosok kekuatan pertahanan negara yang solid dan dinamis.

Alasan rasional diterapkannya sistem Pertahanan Negara adalah untuk Menangkal Segala Bentuk Ancaman dan Gangguan, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pertahanan negara untuk menghadapi perang dari agresi militer oleh negara asing. Dalam kondisi menghadapi agresi suatu negara, kekuatan pertahanan negara dikerahkan untuk menyelenggarakan peperangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan OMP, merupakan pilihan terakhir serta diselenggarakan untuk membela kepentingan nasional dan menjaga serta melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.
2. Terselenggaranya pertahanan negara untuk menanggulangi ancaman militer yang mengganggu eksistensi dan kepentingan NKRI. Ancaman militer berskala terbatas penanganannya dengan pendekatan tertentu dengan pendekatan melalui OMSP, diarahkan kepada penanggulangan bentuk-bentuk ancaman, seperti pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, separatisme, pemberontakan bersenjata dan perang saudara.
3. Terselenggaranya Pertahanan Negara dalam Menangani Ancaman Nirmiliter yang berimplikasi terhadap Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah NKRI, dan Keselamatan Bangsa Indonesia. Ancaman nirmiliter yang membahayakan eksistensi bangsa dan negara, dan tidak dapat ditangani langsung maka dapat menggunakan pendekatan kekuatan bersenjata. Pada dimensi tertentu dapat berakumulasi dan mengancam kepentingan nasional, bahkan mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ancaman nirmiliter tidak dapat dihadapi dengan kekuatan pertahanan bersifat fisik, apabila tidak ditangani akan timbul risiko besar yang mengancam eksistensi NKRI. Berbagai upaya lintas departemen secara terpadu terus dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran jati diri bangsa dan semangat bela negara serta kemampuan nyata pertahanan nilai bangsa didukung kondisi masyarakat yang demokratis, partisipatif dan dinamis.
4. Terselenggaranya Pertahanan Negara untuk Mewujudkan

Perdamaian Dunia dan Stabilitas Regional Indonesia tidak dapat hidup dalam lingkungan global dan regional yang diwarnai konflik yang berkecamuk. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia akan mengembangkan kerja sama pertahanan dengan negara lain sebagai wadah untuk bersama-sama mempromosikan pandangan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

5. Pada prinsipnya terdapat beberapa Sasaran Strategis Pertahanan Negara Menurut Kementerian pertahanan, meliputi:
 - a. Terwujudnya pemberdayaan wilayah yang mampu menghadapi ancaman.
 - 1) Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.
 - 2) Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.
 - 3) Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.
 - 4) Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.
 - 5) Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.
 - b. Terwujudnya manajemen pertahanan yang terintegrasi.
 - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.
 - 2) Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
 - 3) Seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang

- akuntabel sesuai SOP.
- c. Terwujudnya SDM dan TNI yang profesional.
 - 1) Seluruh satuan kerja pemerintahan dan TNI memiliki personel sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan yang terjamin.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi satuan kerja pemerintahan dan TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan IPTEK serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang professional.
 - d. Terwujudnya teknologi pertahanan yang mutakhir.
 - 1) Sistem pertahanan negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.
 - 2) Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri.
 - e. Terwujudnya kemanunggalan TNI dan rakyat dalam bela negara.
 - 1) Masyarakat memiliki sikap dan perilaku bela negara serta mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
 - 2) Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional.

RANGKUMAN

1. Lima substansi sasaran strategis pertahanan Indonesia, meliputi: sasaran di bidang penangkalan, menghadapi ancaman agresi militer, mengatasi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer, mengatasi ancaman nirmiliter, serta dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.
2. Kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkannya, maka pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan yang bersumber baik dari luar maupun dalam negeri.

BAGIAN 5
LANDASAN
PERTAHANAN NEGARA



Pada bagian 5 ini menjelaskan tentang Landasan Pertahanan Negara, yang meliputi: landasan idiil, konstitusional, yuridis, historis, visional, konseptual, doktrinal. Juga tentang tiga strata dalam kepentingan nasional Indonesia, hakikat keamanan nasional Indonesia, hakikat sistem pertahanan semesta, dan geopolitik serta geostrategis bangsa Indonesia. Landasan pertahanan negara memperkuat kepentingan nasional dan sistem pertahanan negara, termasuk dalam menentukan peran dan kedudukan geopolitik dan geostrategis Indonesia dalam percaturan dunia. Didalamnya terkandung cara pandang warga negara Indonesia terhadap wilayah, negara dan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat membawa pada persatuan dan kesatuan bangsa, yang merasa sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.

5.1 Landasan Idiil

Landasan idiil Strategi Pertahanan Negara adalah Pancasila, merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai kedudukan dan fungsinya masing-masing. Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan dan kebersamaan. Nilai nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan berdaya saing.

1.2 Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional Strategi Pertahanan Negara adalah UUD 1945. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum serta memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, di antaranya, pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. UUD 1945 merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Upaya penindasan dan penjajahan akan selalu ditentang dan dicegah oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. UUD 1945 menetapkan sistem pertahanan negara yang menempatkan rakyat sebagai pemeran vital yang dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Maknanya adalah bahwa rakyat merupakan komponen utama. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pertahanan negara pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela TNI, tetapi dapat juga secara tidak langsung, yaitu melalui profesinya masing-masing dalam kehidupan bernegara yang akan memberi kontribusi terhadap pertahanan negara atau menjadi prajurit wajib.

Hal mendasar yang terkait dengan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara adalah bahwa negara dapat mewajibkan setiap warga negara untuk ikut dalam upaya pertahanan negara, yang merupakan konteks yang konstitusional sebagai konsekuensi menjadi warga negara dari suatu negara yang berdaulat. Namun, diwajibkan bagi setiap warga negara dalam upaya pertahanan negara yang didukung dengan perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945.

1.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis Strategi Pertahanan Negara adalah UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang mengatur penyelenggaraan, pengelolaan sistem dan pembinaan kemampuan pertahanan negara.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah melalui kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara.

UU Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman, yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama serta segenap sumber daya nasional lainnya, sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dan didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, TNI menjadi salah satu unsur pendukung.

1.4 Landasan Historis

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan sarat dengan nilai-nilai heroik, patriotik dan nasionalisme yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Identitas tersebut teraktualisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari dalam wujud persaudaraan, gotong-royong, keuletan, ketangguhan, percaya akan kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah, keyakinan meraih kemenangan, serta rela berkorban demi kebenaran dan keadilan. Perjuangan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat adalah perjuangan panjang yang pantang menyerah.

Sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit sampai dengan saat ini, nilai-nilai kesatuan dan persatuan, kebangsaan, patriotisme, serta heroik telah tertanam dan berkembang menjadi jati diri. Jati diri tersebut menjadi instrumen pemersatu bangsa Indonesia dalam upaya merebut kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti hingga mencapai kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa setelah merebut kemerdekaannya, Indonesia menghadapi ancaman dan rongrongan yang dahsyat dari bangsa lain dan dari pihak-pihak yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Namun, berkat rahmat serta tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mampu melampaui setiap ancaman dan tantangan itu sehingga NKRI tetap dapat berdiri tegak.

Keberhasilan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI disebabkan oleh kesamaan tekad bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam wadah NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil usaha bersama dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketika Indonesia bersatu padu, tujuan bersama akan dapat diraih. Sebaliknya, apabila bangsa Indonesia bercerai-berai, Indonesia akan mudah dihancurkan. Perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan harus dikelola sebagai kekayaan dan pemersatu bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah tersebut dapat memberi pelajaran bahwa nilai-nilai perjuangan lahir dari kesadaran sebagai bangsa yang bermartabat untuk menentukan nasib sendiri. Substansi nilai-nilai tersebut menjelma dalam hak dan kewajiban warga negara yang mendasari konsep pertahanan negara yang disusun dalam Sistem Pertahanan Semesta.

5.5 Landasan Visional

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia tempat wilayah Indonesia tersusun dari gugusan kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah dan sarana membangun serta menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan.

5.6 Landasan Konseptual

Ketahanan Nasional merupakan geostrategi Indonesia sebagai implementasi dari konsep Wawasan Nusantara dalam mewujudkan daya tangkal nasional serta mempengaruhi ketahanan regional dan supraregional. Ketahanan Nasional pada hakikatnya berisi keuletan serta ketangguhan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor ideologi, politik, ekonomi, militer, sosial budaya, agama, serta informasi dan teknologi. Faktor-faktor tersebut merupakan kekuatan nasional yang harus dipersiapkan dan dibangun sehingga

menghasilkan suatu kondisi yang dinamis dan kondusif dalam mewujudkan daya tangkal bangsa.

5.7 Landasan Doktrinal

Landasan doktrinal Strategi Pertahanan Negara adalah Doktrin Pertahanan Negara. Doktrin Pertahanan Negara berisi ajaran serta prinsip-prinsip fundamental yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia serta dalam mengelola perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional. Ajaran dan prinsip fundamental dimaksud menuntun bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pertahanan negara. Dalam mengembangkan strategi pertahanan negara, Doktrin Pertahanan Negara menempati posisi yang sangat fundamental. Posisi doktrin tersebut menuntun pengembangan strategi pertahanan negara dalam merumuskan tiga substansi dasar strategi pertahanan, yang meliputi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai (*ends*), sumber daya yang digunakan (*means*), serta cara mencapai tujuan (*ways*) seperti yang digambarkan dalam bagan berikut ini

5.8 Kepentingan Nasional Indonesia

Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat mempunyai cita-cita Nasional dan tujuan nasional sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan Nasional disebut sebagai Kepentingan Nasional yang abadi. Dalam perjalanan sejarahnya, dari waktu ke waktu ditengah-tengah perkembangan lingkungan strategis, baik pada lingkup nasional, regional, maupun global, Indonesia senantiasa memiliki kepentingan nasional yang bersifat dinamis mencakup keamanan nasional, ekonomi nasional dan kesejahteraan nasional. Dalam kurun waktu lima tahunan, kepentingan nasional Indonesia dinyatakan sebagai Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Menengah, yakni Indonesia yang Aman dan Damai, Indonesia yang Adil dan Demokratis, dan Indonesia yang Sejahtera. Kepentingan nasional tersebut terdiri dari 3 (tiga) strata, yaitu:

1. Mutlak, kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berupa integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia.
2. Penting, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan (SARA), Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup.

3. Pendukung, berupa perdamaian dunia dan keterlibatan Indonesia secara meluas dalam upaya mewujudkannya.

5.9 Keamanan Nasional Indonesia

Keamanan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan keamanan nasional Indonesia merupakan kepentingan terhadap keberhasilan segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia yang cakupannya meliputi pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Oleh karenanya, guna menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan dan strategi nasional yang terpadu, antara kebijakan dan strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional. Kebijakan dan strategi keamanan nasional itu sendiri merupakan kebulatan kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan individu. Oleh karenanya implementasi kebijakan dan strategi pertahanan negara sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan nasional memerlukan peran serta aktif departemen/instansi lain yang menangani ekonomi nasional dan kesejahteraan nasional.

5.10 Sistem Pertahanan Semesta

Dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara keamanan nasional, berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan semesta (Sishanta) dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sishanta adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Sishanta adalah juga strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sishanta melibatkan segenap pemegang peran secara komprehensif guna terwujudnya pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan individu.

5.11 Geopolitik dan Geostrategi Indonesia

Konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan beserta masyarakatnya yang sangat beragam, keberadaan Indonesia di posisi silang antara dua benua dan dua samudera, serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan keamanan nasional Indonesia. Menyadari hal itu, maka Indonesia menyusun dan mengembangkan pandangan geopolitik wawasan nusantara (*Archipelagic Outlook*) dan implementasinya berupa geostrategi ketahanan nasional (*National Resilience*).

Pandangan tersebut secara bertahap terus dikembangkan kedalam konteks yang lebih luas berupa wawasan regional dan ketahanan regional. Karakteristik geografi dan demografi Indonesia mengisyaratkan bahwa wawasan nusantara dan ketahanan juga harus terus ditumbuhkembangkan kedalam. Oleh karenanya terus diupayakan peningkatan pemahaman dan implementasi wawasan nusantara dan ketahanan nasional di daerah, terutama di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil termasuk pulau-pulau terluar.

RANGKUMAN

1. Landasan idiil Strategi Pertahanan Negara adalah Pancasila, merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Landasan konstitusional Strategi Pertahanan Negara adalah UUD 1945, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum serta memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara.
3. Landasan yuridis Strategi Pertahanan Negara adalah UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang mengatur penyelenggaraan, pengelolaan sistem dan pembinaan kemampuan pertahanan negara.
4. Landasan historis mengaju pada jejak sejarah bangsa yang dimulai dari jaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit sampai dengan saat ini, dimana nilai-nilai kesatuan dan persatuan, kebangsaan, patriotisme, serta heroik telah tertanam dan berkembang menjadi jati diri bangsa.
5. Landasan visional bangsa adalah Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh.
6. Ketahanan Nasional merupakan landasan konseptual yang pada hakikatnya berisi keuletan serta ketangguhan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor ideologi, politik, ekonomi, militer, sosial budaya, agama, serta informasi dan teknologi.
7. Landasan doktrinal Strategi Pertahanan Negara adalah Doktrin Pertahanan Negara.
8. Tujuan Nasional disebut sebagai Kepentingan Nasional yang abadi.
9. Keamanan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Keamanan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Indonesia menyusun dan mengembangkan pandangan geopolitik wawasan nusantara (*Archipelagic Outlook*) dan implementasinya berupa geostrategi ketahanan nasional (*National Resilience*).

BAGIAN 6
DOKTRIN
PERTAHANAN NEGARA



DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA

Pada bagian 6 tentang Doktrin Pertahanan Negara ini, akan dijelaskan tentang: hakikat doktrin pertahanan negara, kedudukan dan stratifikasi doktrin pertahanan negara, dan doktrin maritim Indonesia sebagai kekuatan maritim Indonesia. Doktrin Pertahanan Negara memiliki arti penting, yakni sebagai penuntun dalam pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara.

6.1 Hakikat Doktrin Pertahanan Negara

Doktrin pertahanan pada hakikatnya adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan sesuai dengan tuntutan tugas pertahanan dalam dinamika perubahan, serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional. Doktrin Pertahanan Negara tidak bersifat dogmatis, tetapi penerapannya disesuaikan dengan perkembangan kepentingan nasional. Doktrin Pertahanan Negara memiliki arti penting, yakni sebagai penuntun dalam pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Pada tataran strategis, Doktrin Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, pada masa damai maupun keadaan perang.

Dalam kerangka penyelenggaraan pertahanan negara, esensi Doktrin Pertahanan Negara adalah acuan bagi setiap penyelenggara pertahanan dalam menyinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara terpadu, terarah, dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan. Pada masa damai, Doktrin Pertahanan Negara digunakan sebagai penuntun dan pedoman bagi penyelenggara pertahanan negara dalam menyiapkan kekuatan dan pertahanan dalam kerangka kekuatan untuk daya tangkal yang mampu mencegah setiap hakikat ancaman serta kesiapsiagaan dalam meniadakan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di

dalam negeri. Pada keadaan perang, Doktrin Pertahanan Negara memberikan tuntutan dan pedoman dalam mendayagunakan segenap kekuatan nasional dalam upaya pertahanan guna menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman yang dihadapi.

6.2 Kedudukan dan Stratifikasi Doktrin Pertahanan Negara

1. Kedudukan Doktrin. Doktrin Pertahanan Negara berada pada tingkatan strategis berskala nasional dalam mengelola sistem pertahanan negara. Dalam mengembangkan kebijakan dan strategi pertahanan negara, doktrin pertahanan negara berkedudukan sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan seluruh doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara.

2. Stratifikasi Doktrin.

Dalam pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara terdapat sejumlah doktrin dengan level dan penggunaannya masing-masing, tetapi satu dengan yang lainnya berada dalam suatu kesatuan yang membentuk strata doktrin. Stratifikasi doktrin terdiri atas doktrin dasar, doktrin induk, dan doktrin pelaksanaan. Doktrin pertahanan negara berada pada tingkatan sebagai doktrin dasar bagi semua doktrin yang berhubungan dengan pertahanan, serta berlaku secara nasional. Tugas dan tanggung jawab penyusunan Doktrin Pertahanan Negara berada dalam lingkup fungsi dan kewenangan Kementerian Pertahanan. Sebagai doktrin dasar, Doktrin Pertahanan Negara memberikan tuntunan bagi seluruh doktrin dalam lingkup pertahanan negara. Doktrin induk adalah Doktrin Pertahanan Militer dan Doktrin Pertahanan Nirmiliter.

Doktrin Pertahanan Militer dijabarkan oleh TNI menjadi Doktrin Tri Dharma Eka Karma atau disingkat Doktrin Tridek. Doktrin Pertahanan Militer berlaku bagi TNI dan komponen penggandanya. Doktrindoktrin yang bersifat kematraan berinduk pada Doktrin Pertahanan Militer. Doktrin Pertahanan Nirmiliter merupakan bagian dari Doktrin Pertahanan Negara, yang penjabarannya disesuaikan dengan kompleksitas fungsi-fungsi nirmiliter serta tuntutan kebutuhan. Wewenang penyusunan Doktrin Pertahanan Nirmiliter berada pada salah satu fungsi Departemen Pertahanan yang membidangi pertahanan nirmiliter. Doktrin pelaksanaan dibedakan atas doktrin pelaksanaan pada lingkup pertahanan militer dan doktrin pelaksanaan pada lingkup pertahanan nirmiliter. Doktrin pelaksanaan pada lingkup pertahanan militer merupakan doktrin-doktrin

pada tingkat matra.

Doktrin matra terdiri atas doktrin pertahanan militer matra darat, yakni Doktrin Kartika Eka Paksi, doktrin pertahanan militer matra laut, yakni Doktrin Eka Sasana Jaya, serta doktrin pertahanan militer matra udara, yakni Doktrin Swa Bhuwana Pakca. Doktrin Pertahanan Nirmiliter dapat dijabarkan ke dalam doktrin-doktrin pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini setiap fungsi pemerintahan di luar bidang pertahanan dapat membuat doktrin pelaksanaan sesuai dengan bidangnya yang menginduk pada Doktrin Pertahanan Nirmiliter, serta pelaksanaannya di bawah supervisi Departemen Pertahanan.

6.3 Doktrin Maritim Indonesia

Doktrin Maritim Indonesia memuat penjelasan dan gambaran bagaimana negara seharusnya menyiapkan diri dalam masa damai maupun krisis khususnya pembangunan kekuatan maritim. Doktrin ini akan mengemukakan posisi TNI AL (sebagai salah satu kekuatan maritim) dalam TNI serta perannya dalam Ocean Policy pemerintah guna mensinergikan kekuatan maritim yang ada. Doktrin ini akan menggariskan bagaimana peran dan kontribusi TNI AL dalam TNI dan negara secara menyeluruh dan bersama-sama instansi lain dalam melindungi kepentingan Nasional Indonesia. Disamping itu doktrin maritim juga menjelaskan bentuk peran serta aktif instansi maritim dalam membangun kekuatan maritim di Indonesia guna menuju negara maritim yang besar.

Beberapa hal yang terkandung dalam doktrin maritim Indonesia nantinya antara lain :

1. Sejarah dan Lingkungan Maritim Indonesia yang akan menjabarkan faktor geografis, ekonomi dan sosial yang membatasi hubungan hubungan negara Indonesia dengan lingkungan maritimnya. Pada permasalahan ini menguraikan tentang bagaimana pentingnya laut sebagai urat nadi transportasi dunia yang sangat tergantung pada kondisi perairan Indonesia khususnya Selat Malaka. Bagian ini juga harus menjelaskan tentang cakupan keamanan nasional yang memiliki berbagai macam persoalan yang ada, serta menjelaskan tentang hubungan antara permasalahan yang berkaitan dengan maritim dan hukum nasional maupun Internasional. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lingkup wilayah kepentingan strategis Indonesia yang sangat luas. Hendaknya

Negara menggantungkan pada laut dalam hal transportasi dan lain lain serta dapat mengambil banyak manfaat dari lingkungan maritim untuk hidup dan sumber sumber daya mineral.

2. Kebijakan strategis yang menjabarkan sifat dasar kebijakan keamanan Indonesia terdiri dari lingkungan strategis Indonesia, kepentingan strategis yang ada, karakter strategis Indonesia dan pengaruh sejarah pada pandangan nasional serta kemampuan - kemampuan maritim dalam mencapai semua tujuan strategi pertahanan negara. Penekanan pada permasalahan ini adalah pentingnya pembangunan kekuatan dan kemampuan maritim dalam mewujudkan seluruh instrumen maritim mencapai tujuan strategi militer Indonesia disertai dengan standar yang harus dipenuhi dari kedua elemen tersebut. TNI merupakan komponen utama dalam melindungi kepentingan kepentingan nasional Indonesia, karakteristik strategis Indonesia berarti kekuatan maritim yang handal adalah pokok bagi TNI khususnya TNI AL dalam melaksanakan keberhasilan tugasnya.
3. Konsep strategis maritim menganalisa tentang latar belakang pemikiran strategis maritim serta hubungan konsep konsep maritim saat ini dan masa mendatang. Penggunaan kekuatan laut dan pengendalian laut adalah dasar bagi negara maritim dalam mencapai tujuan strategis. Dalam permasalahan ini menunjukkan bahwa pengendalian laut juga kritis untuk proyeksi kekuatan secara efektif dalam lingkungan maritim, khususnya bila laut sedang digunakan sebagai sarana untuk pengangkutan dan mendukung kekuatan darat. Pengendalian laut, mencegah penggunaan laut oleh lawan dan proyeksi kekuatan adalah tugas tugas utama kekuatan maritim, sedangkan pengendalian laut, kemampuan untuk menggunakan laut dan mencegah penggunaannya oleh lawan adalah dasar bagi Indonesia dalam mencapai tujuan strategis pada masa konflik.
4. Konsep konsep operasional maritim menjelaskan tentang hubungan atau korelasi dan kerjasama antara kekuatan kekuatan darat, udara dan laut. Menetapkan sifat sifat dasar yang ada dalam penggelaran kekuatan maritim yaitu mobilitas, fleksibilitas dan fungsi asasi kapal perang, akses dan jangkauan dan kemampuan untuk melaksanakan operasi serta kapasitas kapal untuk mengangkut kekuatan tempur yang sangat banyak pada jangkauan jarak yang jauh dan dapat

memberikan banyak alternatif bagi para pembuat kebijakan tentang keputusan politik dan strategi serta kontijensi yang akan diambil nantinya. Menjelaskan pula tentang keterbatasan penggunaan kekuatan maritim dan cara penggunaan kekuatan maritim yang dilengkapi dengan keunggulan kekuatan udara maupun kekuatan darat guna melaksanakan operasi-operasi utama angkatan laut pada masa krisis dan damai. Pendekatan tersebut adalah penggunaan pendekatan kekuatan gabung yang efektif yang akan dicapai dari laut. Kekuatan maritim memiliki karakteristik kemampuan yang unik pada konteks gabungan, dimana keuntungan kekuatan maritim meliputi kesiapan, akses, kekenyalan dan fungsi asasi.

5. Luas wilayah operasi maritim menjelaskan tentang cara-cara yang dapat digunakan oleh kekuatan maritim, dimana peran kekuatan maritim pada dasarnya tergantung pada kemampuan tempur serta kemampuan kemampuan tersebut dapat memberikan dan mendukung kepentingan negara seperti halnya mengembangkantujuan kebijakan luar maupun dalam negeri. Kemampuan bertempur dari kekuatan maritim memberikan dasar penggunaannya untuk misi-misi yang lain dalam skala yang luas. Kekuatan maritim adalah instrumen yang berharga dalam penentuan kebijaksanaan politik dalam dan luar negeri. Kekuatan maritim memberikan kontribusi untuk usaha-usaha diplomatik dan merupakan lambang yang khusus dari kedaulatan nasional dan kepentingan nasional. Kekuatan maritim memainkan peranan yang nyata dalam penegakkan hukum nasional maupun internasional. Kekuatan maritim dapat memberikan dukungan yang kuat dalam operasi-operasi perdamaian.
6. Penunjang kekuatan maritim menjelaskan tentang bagaimana struktur dan organisasi TNI AL dalam mendukung kemampuannya untuk melatih, memelihara dan menunjang kekuatan yang efektif. Pada permasalahan ini juga jelaskan bagaimana hubungan yang efektif antara TNI AL dengan Industri Jasa Maritim Nasional dan juga dengan industri pertahanan lainnya dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya dijelaskan kebutuhan akan pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi hidrografi, ilmu oceanografi dan ilmu meteorologi dalam menunjang operasi-operasi yang menggunakan kekuatan maritim. TNI AL diorganisir dan disusun untuk menghasilkan

kemampuan tempur dan memiliki hubungan yang sangat efektif dengan industri jasa maritim merupakan unsur pokok dalam menghasilkan kemampuan. Dukungan logistik sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tugas sebagai atribut penting dari kekuatan maritim.

7. Instrumen pokok kekuatan tempur maritim menjelaskan bagaimana pengorganisasian seluruh kekuatan maritim dalam melaksanakan tugas serta bagaimana pengerahan seluruh komponen dalam satuan-satuan tugas untuk mencapai hasil yang maksimal dan efek yang terbesar. Pada permasalahan ini hendaknya ditunjukkan pula efektifitas dan fleksibilitas pengerahan kekuatan maritim dalam memberikan sumbangannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, instrumen tersebut baik dari militer maupun non militer. Kekuatan laut, darat dan udara semuanya mempunyai kontribusi untuk menunjang keberhasilan operasi maritim. Keberhasilan pencapaian tugas dalam lingkungan maritim tergantung kepada penciptaan dan pemeliharaan kesadaran ruang pertempuran. Kemampuan kemampuan tempur satuan satuan perorangan dimaksimalkan dengan cara dipadukan dengan unsur unsur lain.
8. Penyelenggaraan kampanye maritim menjelaskan tentang faktor faktor utama dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kampanye maritim, bagaimana penggunaan kekuatan maritim beserta instrumen maritim lainnya pada saat konflik sehingga akan tercapainya keberhasilan tugas. Pada pembahasan ini ditunjukkan bagaimana pentingnya lingkungan maritim beserta instrumennya untuk mencapai tujuan oleh seorang panglima. Perencanaan kampanye yang efektif membutuhkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara tujuan tujuan strategi, cara-cara operasional dan sarana-sarana taktis. Seluruh unsur kekuatan militer berkontribusi terhadap kampanye maritim, sebagaimana kekuatan maritim dapat berkontribusi terhadap kampanye darat dan kampanye udara. Beberapa tahapan khusus dalam melaksanakan suatu kampanye maritim antara lain: Pengenalan krisis, penyusunan kekuatan, penggelaran, operasi pengendalian laut, proyeksi kekuatan, dukungan untuk operasi pantai, rotasi dan penarikan kekuatan.

Kekuatan maritim Indonesia masa depan menggambarkan tantangan dan peluang peluang serta kendala yang akan dihadapi oleh kekuatan

maritim di masa depan. Pada permasalahan ini digambarkan pula implikasi potensial perkembangan-perkembangan teknologi, sosial, ekonomi dan yang menjadi kunci bagi bentuk-bentuk dan peranan-peranan kekuatan maritim, khususnya cara kekuatan maritim dapat meningkatkan kemampuannya untuk secara langsung mempengaruhi kejadian-kejadian di darat. Pengembangan kekuatan maritim adalah suatu rangkaian kejadian (*continuum*) yang terus menerus terjadi. Perubahan teknologi dan sosial menimbulkan tantangan-tantangan dan peluang-peluang bagi kekuatan maritim. Kemampuan dalam bertempur harus diintegrasikan dengan instrumen kekuatan maritim lainnya ke seluruh dimensi.

RANGKUMAN

1. Doktrin pertahanan pada hakikatnya adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan sesuai dengan tuntutan tugas pertahanan dalam dinamika perubahan, serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional.
2. Doktrin Pertahanan Negara berada pada tingkatan strategis berskala nasional dalam mengelola sistem pertahanan negara. Dalam mengembangkan kebijakan dan strategi pertahanan negara, doktrin pertahanan negara berkedudukan sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan seluruh doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara.
3. Doktrin Maritim Indonesia memuat penjelasan dan gambaran bagaimana negara seharusnya menyiapkan diri dalam masa damai maupun krisis khususnya pembangunan kekuatan maritim. Doktrin ini mengemukakan posisi TNI AL (sebagai salah satu kekuatan maritim) dalam TNI serta perannya dalam Ocean Policy pemerintah guna mensinergikan kekuatan maritim yang ada. Doktrin ini akan menggariskan bagaimana peran dan kontribusi TNI AL dalam TNI dan negara secara menyeluruh dan bersama-sama instansi lain dalam melindungi kepentingan Nasional Indonesia.

BAGIAN 7
PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA



PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Pada bagian 7 tentang Perjuangan Bangsa Indonesia ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut: *upaya perjuangan bangsa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia, hakikat perjuangan bangsa Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, tujuan nasional bangsa Indonesia, kepentingan nasional bangsa Indonesia, upaya perdamaian bangsa baik ditingkat nasional, regional maupun global, penyelenggaraan peperangan dalam rangka membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, serta melindungi keselamatan segenap bangsa.*

7.1 Perjuangan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia terlahir melalui suatu kancah perjuangan yang sangat panjang. Upaya perjuangan telah dilakukan sejak jaman VOC dan Pemerintah Belanda yang ingin tetap melanggengkan kekuasaannya sebagai penjajah di Indonesia. Upaya perjuangan melawan penjajahan Jepang pun telah dilalui dengan penuh penderitaan. Upaya perjuangan yang panjang, penuh dengan pengorbanan jiwa, raga dan harta, pada akhirnya membuahkan hasil berupa proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Upaya perjuangan tersebut kemudian membentuk karakter dan jati diri bangsa yang terwujud dalam semangat persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI. Nilai-nilai dasar tersebut mengilhami cita-cita bangsa, semangat bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat telah mendasari perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan cucuran darah serta pengorbanan jiwa raga bangsa Indonesia. Nilai-nilai perjuangan tersebut kini menjadi modal dasar bagi keberhasilan pembangunan nasional.

7.2 Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terbentuk bukan karena kesamaan ras, agama, suku, dan golongan, melainkan karena kesamaan tekad dan kehendak untuk bersatu dalam wadah NKRI yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesamaan tekad dan kehendak tersebut merupakan daya rekat segenap warga bangsa yang mewujudkan dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, gotong-royong, dan rasa cinta tanah air. Jati diri bangsa Indonesia terejawantahkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang wajib digelorkan oleh setiap generasi.

7.3 Hakikat Perjuangan Bangsa

Perjuangan bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan segala upaya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pendayagunaan seluruh sumber daya nasional secara terpadu sesuai dengan peran serta fungsi masing-masing yang dilandasi tekad dan semangat cinta tanah air dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.

7.4 Cita-Cita Bangsa Indonesia

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah mengukuhkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam wadah NKRI. Tugas generasi bangsa Indonesia adalah melindungi dan mempertahankan cita-cita yang sudah dicapai serta melanjutkannya dengan melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berdaya saing.

7.5 Tujuan Nasional

Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

7.6 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional Indonesia adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan

keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen, berlaku sepanjang masa. Makna kepentingan nasional yang bersifat permanen tersebut adalah melindungi kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal tanah air dikuasai atau diceraiberaikan oleh pihak manapun.

Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang sifatnya dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antar masyarakat.

7.7 Penyelenggaraan Perdamaian

Penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, harmonis, dan tenteram, baik dalam sistem global maupun nasional. Dalam sistem global, Indonesia berinteraksi dengan negara-negara lain, baik dengan sesama kawa-san maupun di luar kawasan, sehingga akan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini, penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis dengan memandang negara lain bukan sebagai ancaman dan sebaliknya negara lain tidak memandang Indonesia sebagai ancaman. Setiap pertikaian dengan negara lain diselesaikan dengan mengedepankan usaha-usaha damai.

Perwujudan perdamaian ditempuh melalui peningkatan kerja sama bilateral, regional, dan internasional dengan mengembangkan prinsip saling percaya, mengedepankan diplomasi, serta melakukan upaya-upaya penanganan dan penyelesaian konflik lainnya. Indonesia sebagai negara yang cinta damai akan selalu tampil dalam setiap usaha bagi terwujudnya perdamaian dunia, baik secara politik maupun melalui kekuatan pertahanan dalam tugas-tugas perdamaian dunia dan regional.

Penyelenggaraan perdamaian juga berefek ke dalam, yakni dalam rangka stabilitas nasional bagi terwujudnya tata tenteram kerta raharjadi

seluruh wilayah Indonesia. Dalam membangun stabilitas nasional, setiap konflik dalam negeri, baik vertikal maupun horizontal, diselesaikan dengan cara-cara yang bermartabat dan berperikemanusiaan melalui pendekatan hukum, kesejahteraan, keadilan, dan dialogis dalam membangun kohesi nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Keputusan menggunakan kekuatan pertahanan dalam mengatasi isu-isu keamanan dalam negeri didasarkan atas pertimbangan yang saksama terhadap perkembangan situasi serta ditempuh melalui keputusan politik.

Komitmen bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perdamaian adalah hidup berdampingan dengan bangsa lain secara damai, dengan berpedoman pada delapan asas perdamaian. Kedelapan asas tersebut adalah tujuan, waspada, kekenyalan, kekuatan, kolektif, kelanggengan, transparansi, dan prioritas.

1. Asas Tujuan. Tujuan penyelenggaraan perdamaian pada hakikatnya tetap tegaknya kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan dan kesejahteraan rakyat, serta pengamanan kepentingan nasional seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika lingkungan strategis..
2. Asas Waspada. Waspada terhadap setiap kemungkinan perubahan situasi dan pendadakan strategis, tidak ada yang abadi selain kepentingan.
3. Asas Kekenyalan. Damai bukan berarti tidak perang. Mewujudkan perdamaian terkadang harus melalui penggunaan kekuatan fisik untuk tujuan perang. Kalau ingin damai, negara harus bersiap untuk perang.
4. Asas Kekuatan. Damai dapat diwujudkan atau dipertahankan apabila memiliki kekuatan dan kemampuan yang memadai. Pembinaan kekuatan dan kemampuan harus selalu dikembangkan guna meningkatkan kesiapsiagaan.
5. Asas Kolektif. Damai merupakan kebutuhan bersama dan dalam mewujudkannya melibatkan semua pihak, bukan untuk satu golongan atau satu pihak. Upaya mewujudkan perdamaian merupakan integrasi secara militer maupun nirmiliter.
6. Asas Keberlanjutan. Damai tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil upaya bersama yang berkesinambungan. Upaya mewujudkan kondisi damai dilaksanakan sepanjang waktu dan tidak boleh terhenti.

7. Asas Transparansi. Setiap upaya untuk mewujudkan kondisi damai harus mengedepankan prinsip saling percaya. Prinsip transparansi dalam rangka mewujudkan rasa saling percaya juga dikembangkan dalam pembangunan dan penggunaan kekuatan pertahanan.
8. Asas Prioritas. Pada hakikatnya setiap usaha untuk mewujudkan kondisi damai yang sejati sebagai dasar kepentingan bersama diletakkan pada prinsip cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.

7.8 Penyelenggaraan Peperangan

Perang diselenggarakan untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, serta melindungi keselamatan segenap bangsa. Perang bagi bangsa Indonesia adalah perang semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan segenap kekuatan nasional. Pernyataan perang dengan bangsa lain dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan oleh Presiden melalui pernyataan politik secara resmi. Hal mendasar yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan peperangan: keyakinan akan kekuatan sendiri, tidak mengenal menyerah dan tidak akan menyerahkan diri atau menyerahkan wilayah Indonesia kepada pihak lawan, keyakinan akan kemenangan, dan perlawanan tidak akan berhenti sebelum mencapai kemenangan.

Perang diselenggarakan dengan strategi pertahanan berlapis dan mendalam dengan mendayagunakan seluruh kekuatan dan kemampuan nasional ke dalam konsep Perang Rakyat Semesta. Keberhasilan Perang Rakyat Semesta ditentukan oleh kemanunggalan TNI-Rakyat. Karena itu, pembangunan pertahanan dan gelar kekuatan berdimensi kewilayahan (teritorial) dan diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun dan memelihara kemanunggalan TNI-Rakyat bagi terwujudnya daya tangkal bangsa. Penyelenggaraan peperangan pada hakikatnya penataan sistem pertahanan yang mencakupi penyiapan kekuatan, penyiapan wilayah negara sebagai medan pertahanan, penyiapan logistik pertahanan, pelaksanaan peperangan, dan pemulihan terhadap dampak kerusakan akibat peperangan.

Perang di masa depan akan semakin kompleks, mengandalkan keunggulan teknologi, presisi, dan penguasaan ruang. Oleh karena itu, penataan sistem pertahanan tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan sifat atau karakteristik peperangan masa depan. Penyiapan

kekuatan diselenggarakan oleh pemerintah sejak dini dan berkesinambungan melalui pembangunan sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan, yang diorganisasikan ke dalam Komponen Utama, yakni TNI, serta Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, yakni warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Penyiapan kekuatan juga mencakupi penggelaran kekuatan yang pelaksanaannya berdasarkan pertimbangan hakikat ancaman yang dihadapi.

Penyiapan wilayah negara sebagai medan pertahanan diselenggarakan berdasarkan perkiraan strategis tentang kemungkinan ancaman yang dihadapi dan diproyeksikan dalam tiga lapis medan pertahanan, yakni medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama, dan daerah perlawanan. Medan pertahanan penyanggah merupakan lapis terdepan, yakni medan pertahanan yang berada di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah udara di atasnya. Medan pertahanan utama merupakan lapis inti dari medan pertahanan mulai dari Zona Ekonomi Eksklusif sampai dengan laut teritorial, dasar laut, daratan serta wilayah udara di atasnya, yang menjadi mandala perang. Daerah-daerah perlawanan merupakan lapis ketiga yang berada pada wilayah-wilayah belakang di luar mandala perang, termasuk wilayah perairan Nusantara dan wilayah udara di atasnya yang dibangun dan dipersiapkan sebagai daerah pangkal perlawanan untuk memelihara kesinambungan perlawanan.

Penyiapan wilayah negara sebagai medan pertahanan pada dasarnya merupakan fungsi pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan secara terpadu, terkoordinasi, dan lintas departemen/lembaga. Perwujudannya melalui penataan ruang nasional, di dalamnya penataan ruang kawasan pertahanan. Penyiapan logistik pertahanan diselenggarakan secara dini dan terpadu dengan pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan. Penyiapan logistik pertahanan merupakan hal yang fundamental dalam mendukung penyelenggaraan peperangan, merupakan bagian dari pembangunan pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan secara terpadu, terkoordinasi, dan lintas departemen/lembaga. Perwujudannya melalui pembangunan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan yang cukup tinggi serta industri nasional yang berdaya saing dan mandiri, yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kemandirian sarana pertahanan serta pusat-pusat logistik yang tersebar di tiap wilayah.

Pelaksanaan peperangan diselenggarakan dengan strategi

pertahanan berlapis dan mendalam yang memancarkan penangkalan yang kuat serta kemampuan untuk mengatasi ancaman manakala menghadapi ancaman nyata. Strategi penangkalan dikembangkan dengan menyinergikan kemampuan nasional dari aspek politik, ekonomi, psikologi, teknologi, sosial budaya, dan militer yang berefek penolakan dan pembalasan sekaligus. Pelaksanaan peperangan ditentukan pula oleh gelar kekuatan pertahanan yang disesuaikan dengan hakikat ancaman dengan mengutamakan kesiapsiagaan dan mobilitas yang tinggi. Gelar kekuatan TNI dikembangkan secara fleksibel bagi terwujudnya Tri Matra Terpadu sekaligus keterpaduan dengan pertahanan nirmiliter. Perang selalu menimbulkan dampak kerusakan yang hebat, secara psikis maupun fisik, sehingga fungsi pertahanan negara pasca perang adalah memulihkan kembali kondisi negara melalui rehabilitasi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan peperangan.

Rehabilitasi merupakan fungsi pemerintah yang pelaksanaannya secara lintas departemen dan instansi, melibatkan fungsi pertahanan nirmiliter sesuai fungsinya masing-masing, dibantu fungsi pertahanan militer. Upaya pemulihan secara psikis diarahkan pada tata nilai, yakni menata kembali nilai-nilai kebangsaan dan nilai sosial serta memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang terkena dampak peperangan. Bersamaan dengan upaya pemulihan secara psikis, diselenggarakan upaya pemulihan secara fisik, yang diarahkan pada rekonstruksi lingkungan yang mengalami kerusakan selama berlangsungnya peperangan.

Komitmen bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain tidak hanya bergantung pada bangsa Indonesia semata. Negara lain juga mempunyai kewajiban untuk bersama-sama mewujudkan saling percaya yang didudukkan di atas rasa saling percaya dan saling menghormati hak kedaulatan masing-masing negara. Jika upaya perdamaian mengalami jalan buntu dan perang tidak dapat dihindari, penyelenggaraan suatu peperangan berpedoman pada asas-asas perang yang ditetapkan berikut ini. Asas perang mempunyai kegunaan sebagai pedoman untuk menuntun tindakan dalam penyelenggaraan peperangan.

Asas perang pada hakikatnya adalah kebenaran fundamental yang berlaku dalam penyelenggaraan perang dan mempunyai pengaruh tetap terhadap kesudahan dari suatu perang atau persengketaan bersenjata. Asas perang bukan merupakan hukum atau peraturan yang kepatuhannya bersifat kaku. Meskipun asas perang bukan merupakan hukum atau

peraturan, apabila diabaikan, akan menuai risiko yang memberikan keuntungan bagi pihak lawan/musuh. Asas perang pada dasarnya bersifat universal. Namun, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam perang melawan penjajah, perang revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan, serta usaha pertahanan dalam menjaga proses pembangunan nasional dan hasil-hasilnya memberikan pelajaran untuk memperluas asas universal tersebut, seperti tertuang berikut ini.

1. Asas Tujuan. Tujuan harus tetap dipegang teguh. Penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan untuk mencapai tujuan, yakni menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta menjamin keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
2. Asas Mobilitas. Kemampuan mobilitas diwujudkan dalam keleluasaan bertindak, responsif, serta ketanggapsegeraan dalam mengembangkan strategi pertahanan negara serta keleluasaan dalam mendayagunakan segenap sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter.
3. Asas Pemusatan. Kunci utama untuk memenangi perang terletak pada sumber daya manusia yang diperlengkapi dengan sistem senjata, yang bersifat fisik maupun tata nilai, yang didukung oleh manajemen yang andal dalam mendinamisasi segenap usaha pertahanan secara berdaya dan berhasil guna. Pemusatan kekuatan dilakukan untuk menghasilkan daya tangkal yang maksimal serta dalam menghadapi dan merespons setiap ancaman nyata, baik ancaman militer maupun nirmiliter.
4. Asas Keamanan. Asas keamanan menempatkan keamanan pada porsi yang cukup tinggi dalam setiap kegiatan, informasi, alat utama dan sistem persenjataan, serta personel agar tujuan pertahanan negara dapat terlaksana dan mencapai keberhasilan yang optimal.
5. Asas Kedalaman. Asas kedalaman diwujudkan dalam pola penggelaran kekuatan militer secara berlapis serta pendayagunaan kekuatan nirmiliter secara efektif, saling menyokong, dan memperkuat satu sama lain, sehingga penyelenggaraan perang dapat mencapai sasaran dan berlangsung secara berkelanjutan.
6. Asas Keunggulan Moril. Menyadari bahwa faktor keunggulan moril merupakan salah satu kunci keberhasilan tugas, maka setiap perjuangan atau usaha pertahanan negara didasari motivasi yang

kuat, semangat juang pantang menyerah, manajemen yang sehat dan berdaya dukung, serta kepemimpinan yang berwibawa dan berkemampuan.

7. Asas Informasi. Perang di masa datang mengandalkan keunggulan informasi dan teknologi. Keunggulan informasi diperoleh melalui usaha mengembangkan kemampuan dalam menganalisis setiap perkembangan lingkungan strategis serta situasi dalam negeri sehingga terwujud keunggulan informasi secara akurat dan berlanjut.
8. Asas Kesemestaan. Kesemestaan diwujudkan dalam keikutsertaan seluruh rakyat dalam perannya masing-masing, melalui pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter, serta pemberdayaan segenap sumber daya nasional secara maksimal dalam usaha pertahanan negara. Kesemestaan mengandung makna totalitas bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan perang dan dalam menyelenggarakan pertahanan negara dalam arti luas untuk mengamankan eksistensi bangsa dan negara serta kepentingan nasional.
9. Asas Pendadakan. Tindakan pendadakan diwujudkan melalui persiapan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor waktu, tempat, dan sasaran. Persiapan dan kesiapsiagaan mencegah pendadakan dari pihak lawan/musuh sekaligus juga dapat menjadi pendadakan terhadap lawan/musuh sebelum didahului.
10. Asas Kesatuan. Komando Kesatuan komando adalah hal yang mutlak dalam suatu peperangan. Perang terikat pada satu tujuan, ruang dan waktu, serta pembagian/pemisahan dalam sasaran, sehingga diperlukan pengendalian terpusat maupun desentralisasi dalam pelaksanaannya.
11. Asas Perlawanan. Secara Berlanjut Perang harus dapat diselesaikan secepat mungkin untuk menghindarkan rakyat dari penderitaan yang besar dan berkepanjangan. Namun, apabila perang tidak diselesaikan secara singkat, perjuangan melalui perlawanan yang gigih dan menentukan harus dapat dijaga keberlanjutannya sampai mencapai tujuan.
12. Asas Tidak Kenal Menyerah. Prinsip dasar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman atau lawan yang lebih besar sekalipun adalah semangat dan motivasi untuk mencapai keberhasilan.

Keberhasilan dalam usaha perang adalah memenangi perang. Sumber daya dapat saja terbatas, tetapi perjuangan tidak boleh terhenti, yang didasari oleh semangat pantang menyerah.

13. Asas Keutuhan dan Kesatuan Ideologi dan Politik. Pelaksanaan perang harus didasari oleh keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik. Keanekaragaman ideologi dan politik hanya akan membawa perpecahan, dan perpecahan selalu berujung kehancuran. Keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang telah diyakini kebenarannya dan telah teruji sepanjang waktu.
14. Asas Kekenyalan dalam Pikiran dan Tindakan. Situasi selalu berkembang sesuai dengan ruang dan waktu, maka perlu daya dan kreasi untuk bertindak secara kenyal. Kekenyalan diperlukan untuk mampu merespons setiap perubahan situasi yang terjadi dalam dinamika operasi sehingga mampu melaksanakan tugas secara berhasil.

RANGKUMAN

1. Nilai-nilai perjuangan bangsa menjadi modal dasar bagi keberhasilan pembangunan nasional.
2. Bhineka Tunggal Ika merupakan pangejawantahan jati diri bangsa yang majemuk, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3. Hakikat perjuangan bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan nasional.
4. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
5. Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Kepentingan nasional Indonesia adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.
7. Penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, harmonis, dan tenteram, baik dalam sistem global maupun nasional.
8. Perang diselenggarakan untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, serta melindungi keselamatan segenap bangsa. Perang bagi bangsa Indonesia adalah perang semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan segenap kekuatan nasional.

BAGIAN 8
KEKUATAN PERTAHANAN
NEGARA



Pada bagian 8 tentang Kekuatan Pertahanan Negara, membahas tentang: kekuatan sumber daya manusia sebagai inti pertahanan negara. makna tanggap, tanggon dan trengginas sebagai salah satu kompetensi dari SDM yang perlu dioptimalisasi, dan urgensi manajemen sumber daya pertahanan pada masa damai dan dalam keadaan perang. Sumber Daya Manusia merupakan inti dari kekuatan pertahanan negara. Kokoh dan lemahnya suatu pertahanan negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu rasa kebangsaan, jiwa nasionalisme dan patriotisme harus senantiasa dibangkitkan, digelorakan melalui berbagai upaya yang mampu membangkitkan semangat perjuangan bangsa.

8.1 Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pertahanan negara bertumpu pada kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia, yakni rakyat Indonesia, militer maupun nirmiliter, didukung oleh sistem senjata dan manajemen pertahanan yang handal. Keterpaduan ketiga unsur tersebut menghasilkan pertahanan negara yang berdaya tangkal tinggi. Sumber daya manusia inti kekuatan pertahanan negara terletak pada unsur sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor determinan kemampuan pertahanan negara. Indikator sumber daya manusia pertahanan sebagai inti kekuatan pertahanan terletak pada kualitas intelektual, mental, dan fisik yang tercermin dalam kondisi yang tanggap, tanggon, dan trengginas. Untuk mencapai kekuatan pertahanan negara yang andal, kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter harus manunggal dan menguasai sendi-sendi pertahanan negara.

8.2 Tanggap

Tanggap berarti berdaya tangkap dan penalaran yang tinggi yang menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hal yang fundamental dalam membangun pertahanan. Tanggap merupakan faktor yang berhubungan dengan kecakapan dalam mengerahkan segenap indra sehingga secara cepat mengetahui, mencerna dan memahami gejala yang terjadi. Sumber daya manusia yang tanggap tidak sekedar diukur dari pribadinya, tetapi menyangkut kemampuan kesatuan yang berhubungan dengan aspek intelektual yang ditentukan oleh kemampuan berpikir konseptual, penguasaan akan prinsip damai dan prinsip perang, serta penguasaan doktrin. Tanggap atau tidaknya sumber daya manusia ditentukan oleh faktor konseptual yang mencakupi penguasaan akan konsep dan prinsip penyelenggaraan perang dan perdamaian, doktrin, serta bagaimana mengimplementasikan pemikiran konseptual tersebut dalam pola sikap dan pola tindak. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pola tanggap sebagai kekuatan pertahanan negara:

4. Penguasaan Konsep tentang Prinsip Damai dan Perang. Perang adalah jalan terakhir setelah upaya-upaya diplomasi menemui jalan buntu. Pertahanan negara disusun dengan strategi berlapis dan, bila belum berhasil, perang rakyat semesta dalam bentuk perang gerilya diselenggarakan secara berlanjut sampai dapat mengusir musuh dari bumi pertiwi.
5. Penguasaan Doktrin. Doktrin pertahanan menuntun penyelenggaraan pertahanan negara tentang apa yang harus dipertahankan dan dengan apa mempertahankannya. Doktrin digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa serta dari pengalaman dalam menyelenggarakan usaha-usaha pertahanan, keberhasilan maupun kegagalan, untuk dijadikan pelajaran berharga dalam mengembangkan konsep-konsep pertahanan selanjutnya. Atas dasar itu, doktrin harus dipahami, dikembangkan, dan dipedomani.
6. Implementasi Pemikiran Konseptual. Konsepsi pertahanan negara pada hakikatnya merupakan hasil pemikiran konseptual dan strategi. Pemikiran konseptual selalu mengembangkan konsepsi pertahanan negara untuk menjawab tantangan masa mendatang. Pemikiran konseptual tersebut akan melahirkan pemikiran-pemikiran atau gagasangan baru dan maju yang mendorong pengembangan kemampuan pertahanan yang diperlukan dalam menghadapi

kecenderungan perkembangan lingkungan dan perkembangan zaman. Pemikiran atau gagasan baru dan maju sangat penting dalam mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan yang efektif. Pemikiran konseptual mengedepankan sejumlah kemampuan fundamental pertahanan yang saling berhubungan dan terintegrasi serta tidak berdiri sendiri. Kemampuan fundamental tersebut meliputi komando, informasi, persiapan untuk mencegah pendudukan, pengerahan kekuatan, daya tahan, dan daya dukung.

7. Komando berhubungan dengan kewenangan atau otoritas, yang dalam hal ini ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Komando adalah alat kepemimpinan untuk mencapai tujuan. Komando memerlukan sarana yang jelas dan responsif untuk mengarahkan, mengkoordinasi dan mengontrol kekuatan pertahanan. Informasi adalah hal vital dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan. Informasi merupakan bahan penting suatu Komando. Unsur-unsur penting dalam informasi suatu komando adalah akurasi, kecepatan, ketepatan, sumber, dan proses.

Persiapan merupakan tahapan yang fundamental untuk mencegah pendudukan dari pihak lawan. Persiapan kekuatan pertahanan merupakan fase yang menentukan dalam gelar kekuatan. Persiapan menyangkut kegiatan untuk merumuskan kebutuhan, sumber daya, memproses, hingga mencapai kesiapsiagaan. Pengerahan kekuatan diselenggarakan dalam ruang dan waktu yang tepat dengan didasari oleh kejelasan tujuan, sasaran, dan tugas yang diemban. Pengerahan kekuatan menuntut persiapan dan kesiapsiagaan.

Daya tahan meliputi sarana untuk mempertahankan semangat dan menjaga kesinambungan kemampuan pertahanan dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan suatu operasi. Tugas pertahanan yang berbentuk perang maupun tugas-tugas pertahanan lainnya, memerlukan daya tahan yang tinggi. Kekalahan sering terjadi karena ketidakmampuan memelihara daya tahan. Perang biasanya berlangsung lama serta menguras energi, semangat, dan sumber daya, sehingga diperlukan upaya membangun daya tahan yang handal.

Daya dukung meliputi ketersediaan sumber daya guna memelihara kekuatan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan sampai tujuan tercapai. Daya dukung sumber daya tidak akan terwujud dengan sendirinya sehingga penyediaan sumber daya nasional dilaksanakan secara dini melalui

sistem pertahanan negara.

8.3 Tanggon

Tanggon berarti dapat diandalkan, ulet, dan tahan uji. Tanggon merupakan faktor yang berhubungan dengan aspek moral sebagai penentu karakter kesatuan. Tanggon ditentukan oleh moral dan moril yang terkait langsung dengan semangat tempur, motivasi, kepemimpinan, dan manajemen. Motivasi menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, yang menyangkut hasrat yang timbul atas dasar rasa memiliki, tanggung jawab dan komitmen akan tujuan bersama. Motivasi adalah hal yang sensitif sehingga perlu dibangun, dipelihara, dan dipertahankan. Membangun motivasi membutuhkan sarana, yakni kepemimpinan dan manajemen. Awal tumbuhnya motivasi adalah kepercayaan pengikut akan apa yang menjadi tujuan serta kepemimpinan dan manajemen yang mengantarnya menuju tujuan. Produk motivasi adalah iman dan taqwa, jiwa korsa, kebersamaan, dan kinerja.

Kepemimpinan adalah unsur vital untuk membangun, memelihara, dan mempertahankan moril. Kepemimpinan berada di segala tingkatan, dari satuan terkecil sampai yang paling tinggi. Semua pemimpin harus mengakui bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada keseriusan dan kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya. Kepemimpinan adalah proyeksi dari kepribadian dan karakter untuk membawa bawahannya melakukan apa yang baik dan benar untuk organisasi, bukan apa yang baik bagi pemimpin. Potensi kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan penugasan yang terancang dan tertata. Kepemimpinan diawali dari disiplin pribadi sang pemimpin dan merupakan proses yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin mempromosikan kepada bawahannya keputusan yang akurat dan tindakan yang menentukan, memberikan contoh dan nasehat, mendorong dan membangkitkan semangat, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkembang, serta mampu mengukur kemampuan dan batas kemampuan bawahan.

Manajemen adalah pengelolaan sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Manajemen merupakan elemen penting bagi tumbuhnya moril. Tanpa manajemen sumber daya yang baik disertai dukungan administrasi yang memadai, niscaya pembangunan moril akan sia-sia. Manajemen merupakan atribut komando, yang menyangkut

pemberdayaan sumber daya yang sebaikbaiknya. Dalam pertahanan, manajemen menjalankan dua peran penting, yakni aspek ekonomis dari usaha pertahanan serta kesinambungan usaha pertahanan. Ukuran manajemen yang baik adalah kecakapan atau kemampuan untuk mencapai keseimbangan yang sehat, bukan karena surplusnya sumber daya, bukan pula karena keterbatasan sumber daya.

8.4 Trengginas

Trengginas memiliki makna ketangkasan dalam bertindak, yang merupakan kemampuan kesatuan yang berhubungan dengan aspek penampilan yang memancarkan kekuatan dan kesiapsiagaan kesatuan. Trengginas mencakupi kekuatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah dan kualitas kekuatan berkaitan dengan SDM, inti kekuatan pertahanan negara adalah sumber daya manusia pertahanan, yang secara kuantitas mencukupi kebutuhan pertahanan dan secara kualitas berkemampuan dan berdaya tahan. SDM pertahanan adalah unsur yang hidup dinamis, dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. SDM berhubungan dengan faktor kesejahteraan dan keadilan sebagai kebutuhan yang mendasar. SDM sensitif terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan politik sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif. Selain dengan kekuatan, manusia perlu ditopang dengan penguasaan sistem senjata.

Kinerja Kolektif dapat dicapai melalui pemahaman yang komprehensif akan doktrin, strategi, konsep-konsep pertahanan tentang damai dan perang sehingga mencapai kemahiran dalam mengaplikasikannya ke dalam latihan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Kinerja kolektif menjadi tanggung jawab pemimpin kesatuan. Keberhasilan usaha pertahanan sangat ditentukan oleh kinerja kolektif yang perwujudannya ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Pemimpin harus mempunyai kemahiran dalam mengembangkan organisasi yang dipimpinya. Kinerja kolektif juga harus didukung oleh sarana yang cukup berupa sumber daya yang siap didayagunakan. Kesiap-siagaan sebagai faktor trengginas diukur dari tingkat kesiapsiagaan dari kekuatan pertahanan sebagai hal yang mendasar dalam usaha pertahanan. Kesiapsiagaan kekuatan pertahanan akan mencegah pendudukan dari pihak lain, yang memungkinkan keleluasaan dalam mengembangkan strategi. Perang tidak dapat diperkirakan secara pasti kapan terjadinya dan kapan

berakhirnya, sehingga memerlukan kepastian dukungan sumber daya dalam jangka panjang.

Sosok SDM pertahanan yang tanggap, tanggon, dan trengginas menghasilkan kinerja pertahanan secara utuh, sebagai kunci menuju sukses dalam berperang dan memenangi perang. Untuk mencapainya, diperlukan suatu usaha yang dirancang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis dan teknologi.

Sistem senjata dimaksudkan sebagai seluruh kekuatan dan kemampuan nasional, baik yang bersifat fisik maupun yang tidak berbentuk fisik, yang diberdayakan bagi kepentingan pertahanan negara. Sistem senjata yang bersifat fisik adalah alat utama sistem senjata (Alutsista) dan peralatan yang memiliki efek penangkal yang tinggi yang disegani lawan. Kebutuhan untuk memperlengkapi diri dengan sistem senjata yang berefek daya tangkal perlu ditopang oleh bidang industri pertahanan yang kuat untuk memproduksi alat utama sistem senjata yang disegani lawan. Kemandirian di bidang pertahanan harus dibangun dengan memberdayakan sebesar-besarnya kemampuan bangsa dan dijaga keberlangsungannya. Sistem senjata yang bersifat fisik mengikuti perkembangan pada bidang militer.

Sistem senjata juga berupa sistem dan tata nilai yang diwujudkan dalam semangat patriotisme, nasionalisme, kepemimpinan nasional, manajemen nasional, diplomasi, psikologi, informasi, sosial budaya, serta kekuatan ekonomi. Sistem dan tata nilai tersebut merupakan kekuatan bangsa melalui peran serta negara dalam memerankan fungsi bela negara. Esensi untuk memperlengkapi diri dengan sistem senjata dengan sistem dan tata nilai diletakkan pada komitmen Bhinneka Tunggal Ika yang menjejawantah dalam semangat bela negara.

8.5 Manajemen Sumber Daya Pertahanan

Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada dukungan sumber daya nasional yang dapat ditransformasikan menjadi sumber daya pertahanan. Esensi manajemen sumber daya pertahanan adalah pengelolaan sumber daya pertahanan pada masa damai dan dalam keadaan perang. Manajemen sumber daya pertahanan sangat kompleks, mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, pengawasan, dan pengkomunikasian segenap sumber daya pertahanan, dari tingkat kebijakan sampai dengan tingkat operasional. Prinsip fundamental dalam

penyelenggaraan manajemen sumber daya pertahanan adalah efektivitas pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen sumber daya pertahanan, faktor efisiensi hendaknya tidak menghambat pencapaian tujuan pertahanan. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya harus dilakukan secara profesional melalui kalkulasi yang cermat dan didukung oleh pengawasan dan komunikasi yang efektif. Efektivitas penyelenggaraan manajemen sumber daya pertahanan ditentukan oleh organisasi dan kepemimpinan yang kenyal dan profesional.

Organisasi pertahanan memiliki karakteristik yang kenyal, yakni mampu beradaptasi dengan dan memudahisetiap perubahan, tanpa melakukan perubahan yang radikal. Sifat profesional ditunjukkan oleh pengawakan organisasi oleh tenaga manusia dengan tingkat kecakapan yang tinggi didukung sistem rekrutmen yang sangat selektif serta suasana lingkungan kerja yang dinamis. Dalam kerangka itu, organisasi markas-markas besar termasuk Departemen Pertahanan harus ramping dan padat teknologi, bukan padat manusia. Tingkat markas besar tidak menganut sistem kerucut, tetapi lebih mengutamakan pendekatan fungsi yang berbasis kinerja. Organisasi pada tingkat operasional sampai dengan kesatuan tingkat lapangan yang terdepan dari pertahanan militer disusun dengan sistem kerucut, terutama untuk matra darat dan berdasarkan fungsi Alutsista untuk matra laut dan udara.

Organisasi untuk pertahanan nirmiliter, yakni Komponen Cadangan, disesuaikan dengan sifatnya sebagai komponen untuk memperkuat dan memperbesar Komponen Utama, yakni TNI. Susunan dan pembinaan Komponen Cadangan disesuaikan dengan organisasi dan pembinaan TNI yang terdiri atas matra darat, laut, dan udara dengan kekhasan masing-masing. Pengorganisasian Komponen Pendukung berdasarkan pada pengelompokan atau suku komponen pendukung untuk memudahkan pembinaannya dan berada dalam lingkup kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan. Pembinaan Komponen Pendukung disesuaikan dengan garis kebijakan pembangunan nasional yang pelaksanaannya dipadukan dengan kepentingan pertahanan.

RANGKUMAN

1. Penyelenggaraan pertahanan negara bertumpu pada kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia, yakni rakyat Indonesia, militer maupun nirmiliter, didukung oleh sistem senjata dan manajemen pertahanan yang handal.
2. Tanggap berarti berdaya tangkap dan penalaran yang tinggi yang menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hal yang fundamental dalam membangun pertahanan.
3. Tanggon berarti dapat diandalkan, ulet, dan tahan uji. Tanggon merupakan faktor yang berhubungan dengan aspek moral sebagai penentu karakter kesatuan.
4. Trengginas memiliki makna ketangkasan dalam bertindak, yang merupakan kemampuan kesatuan yang berhubungan dengan aspek penampilan yang memancarkan kekuatan dan kesiapsiagaan kesatuan.
5. Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada dukungan sumber daya nasional yang dapat ditransformasikan menjadi sumber daya pertahanan. Esensi manajemen sumber daya pertahanan adalah pengelolaan sumber daya pertahanan pada masa damai dan dalam keadaan perang.

BAGIAN 9
KEBIJAKAN STRATEGIS
PENYELENGGARAAN
PERTAHANAN NEGARA



KEBIJAKAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Pada bagian 9 tentang Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pertahanan Negara, membahas tentang: (1) makna penangkalan Indonesia dibangun dalam strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan, (2) upaya menghadapi ancaman invasi suatu negara, dihadapi dengan strategi pertahanan semesta, (3) upaya menghadapi ancaman nirmiliter, dan (4) pendayagunaan unsur pertahanan militer yang ditempatkan dalam lingkup tugas pelibatan TNI pada pengamanan wilayah wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan, keamanan laut dan perairan, keamanan wilayah udara, bandar udara dan pelabuhan. Kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara ditetapkan atas dasar kemampuan dan kemandirian rakyat semesta dalam ikut serta mempertahankan negaranya.

9.1 Penangkalan

Pertahanan Indonesia diselenggarakan atas dasar keyakinan pada kekuatan sendiri. Indonesia tidak mungkin menyandarkan keselamatan negara dan bangsa kepada bangsa lain, Indonesia juga tidak berada dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain. Kemampuan penangkalan Indonesia menjadi tumpuan dalam mempertahankan diri di tengah dinamika lingkungan strategis. Sistem pertahanan semesta dikembangkan dengan mengedepankan kemampuan penangkalan yang bertumpu pada kekuatan TNI sebagai Komponen Utama, didukung seluruh rakyat Indonesia dalam susunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Penangkalan Indonesia dibangun dalam strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan. Lapis pertahanan militer mengandalkan kekuatan dan

kemampuan TNI dengan Alutsista yang andal serta prajurit yang profesional untuk melaksanakan OMP maupun OMSP. TNI sebagai kekuatan bersenjata dibangun dan dikembangkan secara profesional untuk mencapai tingkat kekuatan yang mencapai standar penangkalan. Ukuran standar penangkalan adalah standar kekuatan di atas kekuatan pokok minimum yang mampu menjaga NKRI serta disegani minimal pada lingkup regional. Upaya mewujudkan profesionalitas TNI diarahkan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan jiwa juang prajurit TNI serta peningkatan Alutsista disesuaikan perkembangan teknologi dan revolusi di bidang militer. Pertahanan militer dilaksanakan secara Tri-Matra Terpadu bersama-sama pertahanan nirmiliter dengan pusat kekuatan berupa dukungan rakyat atas peran TNI sebagai satu kesatuan dan totalitas pertahanan Indonesia. Lapis pertahanan nirmiliter mengandalkan kemampuan dan usaha pertahanan tidak bersenjata dengan mendayagunakan faktor-faktor diplomasi dan politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, dan teknologi. Pemberdayaan dan pendayagunaan lapis pertahanan militer dan nirmiliter pada masa damai, selain untuk tujuan penangkalan, juga diarahkan untuk memberikan efek stabilitas yang memungkinkan pembangunan nasional dapat terselenggara untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi.

9.2 Menghadapi Ancaman Militer

Ancaman militer mendapat perhatian utama karena berakibat langsung terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam menghadapinya diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk dapat melindungi NKRI dengan segala kepentingannya. Strategi pertahanan disesuaikan dengan sumber serta bentuk dan besarnya ancaman faktual yang mengancam Indonesia. Upaya menghadapi ancaman invasi suatu negara, dihadapi dengan strategi pertahanan yang mendayagunakan segenap kekuatan pertahanan secara total karena yang dipertaruhkan adalah mati atau hidupnya NKRI. Dalam menghadapi ancaman militer bukan invasi, penggunaan kekuatan pertahanan negara disesuaikan dengan skala ancaman serta tingkat risiko yang ditimbulkan. Fungsi pertahanan negara menempatkan TNI sebagai Komponen Utama. Meskipun TNI merupakan Komponen Utama pertahanan negara, dalam menghadapi ancaman militer, menghadapi agresi militer suatu negara, lapis diplomasi tetap menjadi pilihan sebagai lapis pertama untuk sebesar-besarnya mencegah berkobarnya perang dengan kekuatan senjata. Lapis

diplomasi diselenggarakan dengan didukung lapis perlawanan tidak bersenjata dan lapis pertahanan militer dengan menyiagakan segenap kekuatan TNI di seluruh Indonesia.

Sebagai kelanjutan dari dan sekaligus memperkuat upaya-upaya diplomasi, lapis perlawanan tidak bersenjata diberdayakan sebesar-besarnya sebagai wujud penolakan bangsa Indonesia terhadap suatu negara yang hendak menyerang Indonesia. Lapis perlawanan tidak bersenjata dalam menghadapi agresi suatu negara dikembangkan melalui usaha-usaha perang psikologis. Apabila usaha diplomasi serta perlawanan tidak bersenjata gagal atau tidak efektif sehingga tidak mencegah agresi militer yang dilakukan suatu negara, lapis pertahanan militer, yakni kekuatan TNI menjadi pilihan terakhir dan paling menentukan. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU mengerahkan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer untuk perang guna menyelamatkan NKRI dari ancaman agresi militer. Selanjutnya, Presiden memobilisasi Komponen Cadangan untuk menjadi pengganti TNI, yang pendayagunaannya diatur lebih lanjut oleh Panglima TNI.

Berdasarkan putusan politik, dalam pengerahan kekuatan TNI untuk menyelenggarakan OMP, Panglima TNI mengerahkan TNI dengan mengembangkan strategi militer untuk menghadapi dan mengatasi agresi militer negara lain yang nyata-nyata mengancam Indonesia. Untuk memelihara kesinambungan operasi militer TNI, Panglima TNI menggunakan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang telah dimobilisasi sebagai pengganti kekuatan Komponen Utama. Dalam menghadapi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer, instrumen dan strategi yang digunakan disesuaikan dengan bentuk dan besarnya ancaman serta tingkat resiko yang ditimbulkannya.

9. Menghadapi Agresi Militer. Ancaman militer dari suatu negara yang hendak menyerang Indonesia dalam bentuk agresi militer atau tindakan serangan preemptive diposisikan dalam tingkatan prioritas paling tinggi, merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia. Upaya menghadapi ancaman militer negara lain dilaksanakan dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional. Pelaksanaannya dengan strategi pertahanan berlapis yang disusun secara mendalam. Wujud pertahanan berlapis yang disusun secara mendalam dimulai dari pertahanan nirmiliter dengan melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi

dan perlawanan tanpa senjata serta diikuti pertahanan militer apabila upaya pertahanan nirmiliter tidak lagi efektif.

10. Lapis Diplomasi. Komitmen bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa adalah tidak akan membiarkan negara lain menduduki atau menguasai setiap jengkal tanah di wilayah Indonesia. Dalam menghadapi ancaman militer negara lain, bangsa Indonesia akan mengembangkan strategi pertahanan defensif aktif. Salah satu wujudnya adalah mengedepankan diplomasi sebagai garis terdepan pertahanan negara. Perang harus dapat dicegah dengan pendekatan politik penjinakan, yakni mengintensifkan usaha-usaha diplomatik. Dalam sistem pertahanan, diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan, merupakan modalitas yang dikembangkan secara efektif untuk mencegah suatu negara menyerang Indonesia. Usaha-usaha diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter melalui politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya disiapsiagakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus untuk melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami jalan buntu. Keberhasilan usaha-usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni pengemban politik luar negeri.
11. Lapis Perlawanan Rakyat Tidak Bersenjata. Perlawanan Rakyat tanpa senjata untuk menolak usaha suatu negara yang hendak menyerang Indonesia merupakan salah satu lapisan pertahanan yang masih dapat dikembangkan, tidak dimaksudkan untuk menjadikan rakyat sipil sebagai "tameng hidup" atau menjadikan seluruh rakyat sebagai kombatan. Perwujudannya adalah reaksi spontan dan menyeluruh dari bangsa Indonesia untuk menentang dan menolak aksi serangan militer suatu negara. Penentangan dan penolakan setiap bentuk usaha negara lain yang menyerang Indonesia dapat melalui aksi turun ke jalan, mendorong aksi solidaritas antarsesama negara kawasan, sesama anggota organisasi negara-negara Islam, dan negara-negara anggota Gerakan Non-Blok dan PBB.
12. Lapis Pertahanan Militer. Lapis pertahanan militer adalah perlawanan dengan kekuatan senjata untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Pertahanan militer berintikan TNI sebagai

kekuatan utama, didukung oleh kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung. Pengerahan kekuatan militer dilakukan apabila lapis pertahanan melalui diplomasi dan usaha-usaha kekuatan tanpa senjatalainnya telah mengalami jalan buntu. Tahapannya adalah pengerahan Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung dalam strategi pertahanan berlapis. Upaya pertahanan militer dikembangkan dalam pola OMP yang disusun dalam strategi pertahanan defensif aktif dan pertahanan berlapis untuk tujuan preventif, preemptif, dan koersif.

13. Menghadapi Ancaman Militer Berbentuk Bukan Agresi. Pengerahan kekuatan siap nasional dilaksanakan untuk menghadapi bentuk ancaman militer tersebut, dengan memperhatikan besarnya ancaman. Kekuatan TNI, secara matra maupun gabungan dalam susunan Tri-Matra Terpadu, akan dikerahkan menghadapi ancaman militer yang berbentuk bukan agresi dan serangan preemptive, yang besarnya kekuatan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan besaran ancaman yang dihadapi; menggunakan strategi pertahanan yang telah ditetapkan.
14. Menangani Pelanggaran Wilayah. Menghadapi aksi pelanggaran wilayah oleh negara lain, dilaksanakan penggunaan kekuatan pertahanan militer sebagai wujud upaya penegakan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dan bangsa Indonesia. Bentuknya dilakukan melalui langkah-langkah militer sesuai dengan kewenangan dengan mengerahkan kekuatan militer yang disiagakan, dengan mengutamakan tindakan preventif atau koersif dan memperhatikan besar kekuatan yang dikerahkan terhadap ruang dan waktu serta besaran ancaman yang dihadapi. Tindakan preventif atau koersif tersebut dikembangkan dalam pola OMP, yang pelaksanaannya terbatas dan terukur sehingga dapat mencegah konflik yang lebih luas, dilakukan secara terbatas dan terukur dan mengedepankan tindakan preventif berupa peringatan kepada pelaku, dan menggiringnya ke luar wilayah. Peran pertahanan nirmiliter dengan lingkup upaya diplomasi merupakan lini terdepan pertahanan, diplomasi dikembangkan secara efektif untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk pelanggaran terhadap wilayah Indonesia. Upaya diplomasi merupakan sarana untuk menyelesaikan bentuk-bentuk pelanggaran wilayah dengan menjunjung tinggi

derajat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pengerahan kekuatan TNI dalam memperkuat diplomasi dilakukan dalam skala terbatas dengan memperhatikan arahan dari pemerintah. Upaya nirmiliter selain diplomasi adalah melalui pembenahan perangkat hukum yang berkaitan dengan perbatasan antar negara.

15. Mengatasi Gerakan Separatisme dan Pemberontakan Bersenjata. Penggunaan kekuatan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman separatisme dan pemberontakan bersenjata dilakukan berdasarkan putusan politik pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang. Penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan melalui OMSP dengan mengembangkan strategi operasi yang tepat dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Peran pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman separatisme adalah mengefektifkan fungsi-fungsi pembangunan nasional dengan akar masalah separatisme dapat diatasi melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan. Ancaman separatisme berakar pada faktor-faktor nirmiliter sehingga harus dihadapi pula dengan pendekatan nirmiliter. Muara dari pendekatan nirmiliter adalah bagaimana membawa seluruh warga negara Indonesia merasa nyaman tinggal di negaranya sendiri sehingga bibit-bibit separatisme tidak berkembang. Rasa kebanggaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dalam wadah NKRI dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dan dikembangkan.
16. Menangani Sabotase. Penggunaan kekuatan militer dalam penanganan sabotase adalah dalam rangka pengamanan VVIP dan untuk melindungi objek vital nasional strategis, instalasi pemerintah, atau instalasi militer. Penanganan dilaksanakan dengan strategi dan pola operasi khusus dalam bentuk OMSP. Kekuatan yang dikerahkan sesuai tingkatan risiko serta misi yang diemban. Peran pertahanan nirmiliter dalam mengatasi ancaman sabotase, sesuai dengan fungsinya, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tanggap terhadap situasi yang berkembang di lingkungannya serta melaporkan secara dini kepada pihak yang berwenang apabila terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan sabotase.
17. Menangani Aksi Spionase. Penanganannya aksi spionase dapat menggunakan kekuatan dan kemampuan militer. Strategi yang digunakan menghadapi aksi spionase adalah pola operasi khusus

untuk membongkar, melumpuhkan dan membersihkan jaringan spionase. Unsur pertahanan nirmiliter mempunyai peran signifikan dalam menghadapi spionase, sesuai dengan fungsinya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berperan aktif sebagai lini terdepan dalam mengawasi kegiatan mencurigakan di lingkungannya dan melaporkannya kepada pihak berwajib.

18. Menangani Ancaman Terorisme. Dalam penanggulangan ancaman terorisme, Indonesia telah menetapkan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Penerapan undang-undang tersebut cukup efektif dan memberikan efek tangkal yang besar. Pemerintah dan DPR juga telah meratifikasi dua konvensi internasional mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pemboman oleh Terorisme Tahun 1997 dan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999. Menyadari bahwa terorisme memiliki jaringan internasional, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani masalah terorisme, diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen, pembangunan kapabilitas, serta pertemuan-pertemuan untuk membicarakan perkembangan ancaman terorisme dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Penanganan aksi kejahatan terorisme melalui pendekatan pertahanan militer, secara hukum merupakan bagian dari fungsi pertahanan negara untuk melindungi segenap warga bangsanya. Penanganan terhadap ancaman terorisme internasional maupun terorisme dalam negeri merupakan bagian dari tugas TNI sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tugas tersebut dilaksanakan TNI dengan pola pendekatan preventif dan represif/koersif. Penanganan dengan pola preventif lebih diutamakan dengan mengintensifkan fungsi intelijen, penggunaan satuan-satuan khusus yang dipersiapkan sebagai kekuatan responsif, serta pemberdayaan Komando Kewilayahan TNI dan satuan-satuan TNI. Penanganan aksi terorisme internasional atau yang berkolaborasi dengan terorisme dalam negeri dilaksanakan secara lintas instansi dan terpadu serta dapat bekerja sama dengan negara lain berdasarkan garis kebijakan pemerintah dan politik luar negeri. Pelibatan unsurunsur nirmiliter dalam penanganan isu terorisme sesuai dengan

fungsinya diperlukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya teroris.

19. Menangani Ancaman Keamanan di Laut dan Udara. Penanganan terhadap ancaman keamanan di laut dan udara dilaksanakan untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum. Strategi penanganannya melalui pendekatan militer dan nirmiliter. Dalam pendekatan pertahanan militer, strategi yang digunakan disesuaikan jenis ancaman yang dihadapi dengan mengefektifkan kemampuan TNI secara Tri-Matra Terpadu. Dalam hal memerlukan penanganan melalui kerja sama dengan negara lain, upaya-upaya ditempuh berdasarkan putusan politik negara. Pendekatan pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara fungsional, antara lain dengan menyusun, menata, dan membenahi peraturan perundangan yang berlaku agar tidak tumpang tindih dalam implementasi di lapangan. Penataan sistem meliputi sistem perambuan di alur pelayaran untuk kepentingan keamanan navigasi, penataan, dan penertiban penggunaan alur pelayaran laut untuk kepentingan keamanan lingkungan, serta penataan sistem koridor udara untuk kepentingan keamanan penerbangan.
20. Menangani Konflik Komunal. Dalam penanganan konflik komunal, penggunaan kekuatan militer harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Pertama, penggunaan kekuatan militer dalam penanganan konflik komunal didasari oleh putusan politik. Kedua, pelaksanaannya dilakukan dengan OMSP. Ketiga, penggunaan kekuatan serta strategi disesuaikan dengan sifat operasi yang dilaksanakan, yakni OMSP, serta kondisi konflik komunal yang dihadapi. Penanganan unsur pertahanan nirmiliter mencakup hal berikut. Pertama, mengedepankan pendekatan hukum dan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk menyadarkan kelompokkelompok yang bertikai. Kedua, unsur-unsur terkait harus mampu mempelajari akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik dan secara komprehensif mencari solusi terbaik yang dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. Ketiga, peningkatan kehidupan sosial masyarakat di berbagai aspek untuk menghindarkan masyarakat dari kesenjangan sosial, yang dapat menyulut konflik antar masyarakat.

9.3 Menghadapi Ancaman Nirmiliter

Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan yang bersifat tidak langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, risiko yang ditimbulkan dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional, yang menghambat pembangunan nasional, lambat-laun dapat berkembang menjadi permasalahan kompleks yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. Sesuai dengan sifatnya dihadapi dengan pendekatan nirmiliter yang menempatkan departemen dan lembaga nondepartemen sebagai unsur utama dan TNI sebagai pendukung. Untuk menangani ancaman nirmiliter, pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer melaksanakan fungsinya secara proporsional sesuai peraturan perundangan. Bentuk-bentuk ancaman dan gangguan, seperti separatisme, pemberontakan, ancaman dan gangguan terhadap objek vital nasional, ancaman terhadap keamanan Presiden dan Wakil Presiden, beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia, termasuk dampak bencana alam, tergolong ke dalam domain fungsi pertahanan negara yang melibatkan unsur-unsur pertahanan militer maupun nirmiliter.

1. Menghadapi Ancaman Berdimensi Ideologi.

Upaya menghadapi atau menangkal ancaman dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila dan konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Strategi menghadapi ancaman dengan konsep pertahanan berlapis. Lapis terdepan terdiri atas unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni departemen atau LPND yang membidangi ideologi. Departemen serta unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri mengerahkan seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai daerah, departemen serta unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri mengerahkan jajarannya untuk penguatan langkah serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan “operasi informasi imbang”.

Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan memberikan pengajaran dan kesadaran ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang

pendidikan. Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara. Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Titik berat pelaksanaannya adalah dengan peningkatan komunikasi sosial TNI yang bersinergi dengan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh unsur-unsur nirmiliter sesuai bidangnya masing-masing.

2. Menghadapi Ancaman Berdimensi Politik.

Dalam menghadapi ancaman nirmiliter dimensi politik, langkah-langkah yang ditempuh dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia, guna terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan ke dalam diwujudkan melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas ke dalam Tiga Pilar. Pertama, penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Kedua, penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya, mampu bersinergi dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi yang efektif dan kontekstual bagi kepentingan pembangunan nasional, melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara bukan atas kepentingan golongan atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi. Ketiga, penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi massa sebagai instrumen dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subjek politik dan subjek pembangunan nasional.

Pendekatan kedua adalah pendekatan keluar, diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama dan saling percaya dengan negaranegara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antarnegara, yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional, hingga global. Pada lingkup internal, yaitu

melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN plus Enam yang terdiri atas 10 negara anggota ASEAN bersamasama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, melalui hubungan bilateral yang harmonis dan terpelihara serta diwujudkan dalam kerja sama yang lebih konkret. Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Forum Regional ASEAN (ARF). Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensipotensi ancaman dimensi politik serta melakukan langkahlangkah pencegahan. Lapis pertahanan militer mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usahausaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan nirmiliter.

3. Menghadapi Ancaman Berdimensi Ekonomi

Dalam menghadapi ancaman dimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Aspek ekonomi dalam kerangka pertahanan negara memiliki peran vital. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi memungkinkan terselenggaranya pembangunan pertahanan yang berdaya tangkal, bahkan menjadi daya tangkal pertahanan yang cukup efektif. Diperlukan akselerasi pembangunan perekonomian nasional yang berdaya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Menghadapi ancaman berdimensi ekonomi internal, prioritas kebijakan berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja.

Menghadapi ancaman dimensi ekonomi eksternal, membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan

ekonomi-politik dunia, dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri. Diperlukan adanya peningkatan upaya pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak terjangkau sarana transportasi umum. Program Bakti TNI yang melibatkan kerja sama dengan unsur pertahanan nirmiliter lainnya lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana prasarana masyarakat yang membawa dampak peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

4. Menghadapi Ancaman Berdimensi Sosial Budaya

Konflik horizontal yang berdimensi SARA pada dasarnya timbul sebagai akibat masih melekatnya watak kekerasan. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan, termasuk perusakan lingkungan dan bencana buatan manusia. Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya luar yang sulit dibendung mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antarmasyarakat terjadi secara langsung. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta-merta dan sulit dikontrol. Dimensi sosial budaya yang menjadi ancaman yang melemahkan bangsa Indonesia adalah peredaran narkotika dan obat terlarang yang mengancam generasi muda Indonesia. Peredaran media pornografi serta perdagangan wanita selain mengancam moral juga menjadi media penyebaran virus HIV/AIDS.

5. Menghadapi Ancaman Berdimensi Berbasis Teknologi dan Informasi

Pengelolaan teknologi dan informasi untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia yang menguasai dan memahami teknologi dan informasi juga merupakan peran yang dilaksanakan oleh unsur pertahanan nirmiliter. Guna menghadapi ancaman teknologi dan informasi secara konkret, strategi pembangunan nasional di bidang teknologi dan informasi diselenggarakan untuk mewujudkan kemandirian industri nasional yang berdaya saing di dunia internasional sehingga mampu mengatasi ketergantungan teknologi dari negara-negara lain.

Dalam bidang pertahanan, pembangunan teknologi pertahanan ditujukan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa, yakni kemampuan untuk memproduksi sendiri kebutuhan pertahanan yang meliputi persenjataan, amunisi dan pro-pelan, alat komunikasi pertahanan, serta bidang otomotif

dengan memproduksi mesin-mesin kendaraan taktis hingga kendaraan tempur berat. Dalam pembangunan industri pertahanan, peran informasi vital untuk keberhasilan upaya pertahanan sehingga secara bertahap akan dikembangkan kemampuan menuju network centric warfare. Lapis pertahanan militer berperan untuk memberikan bantuan perkuatan terhadap unsur utama pertahanan nirmiliter. Pemberdayaan bidang-bidang penelitian dan pengembangan teknologi yang dimiliki dalam mendeteksi ancaman serta membantu mengakselerasi usaha-usaha kemandirian industri pertahanan dalam negeri merupakan strategi yang dipilih untuk menghadapi ancaman berdimensi teknologi dan informasi.

6. Menghadapi Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum

Fungsi keselamatan umum bersifat multi-instansi, perlu suatu manajemen yang mengintegrasikan fungsi pemerintahan dan nonpemerintahan dalam satu kesatuan pengendalian. Penanganan wabah penyakit pandemik, instrumen yang dikedepankan dari unsur kesehatan dan pertanian, bergantung pada titik berat bahaya yang dihadapi, dibantu unsur sektor lain. Penanggulangan dampak bencana alam, unsur utama bertindak untuk mendinamisasikan kekuatan nasional untuk penanganan pengungsian, pencarian korban, serta usaha-usaha konkret untuk mengatasi dampak bencana serta langkah-langkah rekonstruksi. Unsur utama berasal dari pertahanan nirmiliter yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana alam didukung unsur-unsur lainnya. Lapis pertahanan militer dalam hal keselamatan umum yang menyangkut penanganan dampak bencana alam dengan skala besar adalah menggerakkan TNI sebagai kekuatan yang siap dikerahkan dan digunakan untuk membantu unsur-unsur pertahanan nirmiliter lainnya.

Pelibatan TNI dalam penanganan bencana alam pelaksanaannya dalam kerangka OMSP, meliputi penanggulangan dampak bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Peran aktif TNI dalam menanggulangi dampak bencana membuktikan bahwa TNI memiliki kemampuan, keterampilan dan kesungguhan untuk tampil sebagai instrumen negara yang diandalkan. Untuk menghadapi tugas-tugas serupa di masa datang, perlu pemberdayaan kemampuan TNI yang meliputi bidang manajemen, keterampilan prajurit, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan prioritas pemerintah. Upaya peningkatan bidang manajemen diarahkan pada penataan organisasi, mekanisme kerja, sistem komando dan pengendalian serta hubungan antar departemen/lembaga.

Dalam bidang keterampilan prajurit, upaya yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan fungsi dan peran kelembagaan TNI yang mampu membekali prajurit dengan keterampilan yang diperlukan.

9.4 Pertahanan Militer dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter Lintas Negara

Pendayagunaan unsur pertahanan militer ditempatkan dalam lingkup tugas pelibatan TNI yang mencakup pengamanan wilayah wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan, keamanan laut dan perairan, keamanan wilayah udara, bandar udara dan pelabuhan. Penanganan berupa unjuk kekuatan sebagai penggentar dalam rangka pencegahan, penindakan awal, termasuk kekuatan gabungan bersama dengan unsur nirmiliter, merupakan tugas OMSP TNI.

Bentuk-bentuk penanganan TNI untuk menegakkan keamanan di laut meliputi penyelidikan, pengejaran, penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan di laut. Dalam kerangka fungsi polisional, TNI tidak melakukan fungsi pengadilan. Penegakan keamanan di udara adalah bagian yang sulit dipisahkan dari fungsi TNI dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, menjaga wilayah udara dari segala bentuk pelanggaran kedaulatan di udara, memberikan efek bagi keselamatan penerbangan sipil yang merupakan ranah otoritas sipil.

RANGKUMAN

1. Makna penangkalan Indonesia dibangun dalam koridor strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dengan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan. Sistem pertahanan semesta melibatkan segenap elemen bangsa untuk ikut serta dalam upaya pembelaan terhadap negara dan bangsanya.
2. Upaya menghadapi ancaman invasi suatu negara, dihadapi dengan strategi pertahanan semesta. Keikutsertaan segenap elemen bangsa dalam rangka bela negara akan mampu melindungi NKRI dari segala ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan yang bersifat tidak langsung dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.
4. Pendayagunaan unsur pertahanan militer yang ditempatkan dalam lingkup tugas pelibatan TNI pada pengamanan wilayah wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan, keamanan laut dan perairan, keamanan wilayah udara, bandar udara dan pelabuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, B., Waever, O., 2003. *Regions and Power, The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008 (Jakarta: Dephan RI, 2008).
- Dephan RI, 2007. Strategi Pertahanan Negara. Jakarta (dasar utama).
- Edy Prasetyono, Masalah –Masalah Bidang Pertahanan dan Keamanan, diakses pada tanggal 12 Agustus pukul 15.40, melalui www.propatria.or.id/loaddown/index.php?induk=90 pdf.
- Juwono Sudarsono, “Mengembangkan Pertahanan Nir-militer Indonesia”, Ceramah Menhan RI pada Peserta Training of Trainer (TOT) anggota Badiklat Dephan, 30 September 2005, Jakarta.
- Kusnanto Anggoro, Angkatan Udara dan Pertahanan Negara Maritim Indonesia, (Jakarta: Bahan Suplemen Focus Group Discussion Propatria, 2003).
- Lemhanas, 1995. Kewiraan Untuk Mahasiswa, Dirjen Dikti Depdikbud dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Snyder, Craig A. ,1999. *Contemporary Security and Strategy*. New York: Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Biro Hukum Setjen Dephan, 2002, Jakarta.

INDEKS

A

Ancaman militer, 19, 20

Ancaman nirmiliter, 20, 21, 22, 23

D

Doktrin, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

G

Geopolitik dan Geostrategi, 54

L

Landasan Idiil, 48

Landasan Konstitusional, 49

Landasan Yuridis, 49, 50

Landasan Historis, 50

Landasan Visional, 51

Landasan Konseptual, 51

Landasan Doktrinal, 52

P

Penangkalan, 90, 91

S

Spektrum konflik, 23, 24

SLOC, 27, 28

SLOT, 27, 28

T

Tanggap, 81, 82

Tanggon, 83, 84

Trengginas, 84, 85

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang memiliki nama lengkap Mayjen TNI Purn Dr. Ir. Arief Rachman, MM, MBA, dilahirkan di Baturaja pada 6 Agustus 1957 yang silam dari pasangan ayahanda Muhammad Dawam (alm) dengan Ibu Mastukah. Penulis merupakan lulusan Akmil 1980. Pendidikan umum yang pernah ditempuhnya, meliputi: S1 Teknik Industri (1998), S2 Magister Manajemen (2000 dan 2009), dan S3 Kajian Budaya Media UGM (2013).

Adapun pendidikan militer pengembangan umum yang pernah ditempuh selepas lulus Akmil di Magelang, antara lain: Suslapa II (1990), Seskoad (1995), Sus Athan (2000), Army War College Amerika Serikat (2004), Susdanrem (2005), Lemhannas (2007), IPCSS AS (2010), NIIR Clingendael Nederlands (2012), dan USARPAC AS (2013).

Sedangkan pendidikan militer pengembangan spesialis yang pernah diikutinya, meliputi: Susarcabif (1980), Susarpara (1981), Platoon Armed Wings Inggris (1980), Platoon Leader Course Inggris (1980), Sus Bahasa Inggris USA (1983), Tactical Intelligent Course USA (1983), American Languages Course (1985), Special Forces USA (1985), Ranger USA (1987), Air Borne USA (1987), Pathfinder USA (1987), Susbintal Fungsi Komando (1993), Intelligent Strategic (1999), Sus Bahasa Inggris (1999), Sus Komputer (1999), Sus Auditor (2005).

Penulis memiliki beragam penugasan yang pernah dilaluinya, meliputi: Timor Timur (1980, 1984), Opskam Aceh (1990), Opstam Papua (1990), Opster Papua (1994), Perbatasan Papua (1995), Pam Ibukota (1996), Bencana Alam Aceh (2004), Bencana Alam Yogyakarta (2006), Pengamanan Perbatasan NTT (2006), Pengamanan Pulau-Pulau Terdepan Wilayah NTT (2006), Bakti TNI Pembangunan Rumah Pengungsi korban Konflik Perbatasan Timor-Timur sebanyak 8000 rumah di NTT (2006-2007), Bencana Alam Bantul Yogyakarta (2006), Bencana Alam Manggarai NTT (2007), Bencana Alam Sumbar (2009), dan Bencana Alam Merapi Yogyakarta (2011).

Penugasan lain keluar negeri juga sangat beragam, diantaranya meliputi: penugasan ke Australia (1980); pendidikan di Inggris (1981) di USA (1983 sd 1987); OJT, Latma, dan Lomba menembak di Malaysia (1988, 1991,

1992), Unamic dan Untag PBB di Kamboja (1991, 1992, 1993), Untag di Korea Selatan (1997), Australia (1997, 1998), Philipina (1999); Pakistan, Srilanka, Afghanistan, Maladewa (2000-2003), Australia (2002), Afghanistan (2002, 2003), Srilanka (2003), Uzbekistan (2003), Libya (2003), USA (2004), Australia (2007), Timor Leste (2008), Malaysia (2008), Saudi Arabia (2008), China (2009), Malaysia (2010), USA (2010), Papua New Guinea (2013), Singapura (2013), Malaysia (2014), Saudi Arabia (2014), Oman (2014), Malaysia (2014), Thailand (2015), Malaysia (2015), Bangladesh (2015), India (2015), Pakistan (2015), Saudi Arabia (2015), Vietnam (2015), Kamboja (2015), Malaysia (2015), Jepang (2015), Brunai (2015), Bangladesh (2016), USA (2016), Saudi Arabia (2017), Srilanka (2017), India (2018), Turkiye (2019), Pakistan (2019), Uzbekistan (2019), Lebanon (2019), Jordan (2019), Palestina (2019), Mesir (2019).

Penulis juga mempunyai segudang pengalaman dalam penugasan jabatan penting di TNI AD, meliputi: Liaison Officer Kamboja (1991), Observer Kamboja (1991), Wadan Kontingen Garuda XIID (1993), Athan RI Islamabad Pakistan (2000), Kadep Ilpengtek Seskoad (2004), Kadep Jemen Seskoad (2004), Danrem 161/WS Dam IX/UDY (2006), Staf Khusus Panglima TNI (2009), PA Sahli Tk II Bidang Manusia (2010), Ses Unhan/Dosen Unhan (2012), Koorsahli Kasad (2012), Danseskoat (2013), Staf Khusus Kasad Bidang Kedaerahan (2014), Dosen Tetap Pascasarjana Unhan (2014), Duta Besar KBRI Kabul Afghanistan (2017).

Penulis memiliki banyak tanda jasa, meliputi: SL.CPAF, SL. Dwidya Sistha, SL. Kesetiaan VIII Tahun, SL. Kesetiaan XVI Tahun, SL. Kesetiaan XXIV Tahun, SL. PBB Unamic, SL. PBB Untag I, SL. PBB Untag II, SL. Raksaka Dharma I, SL. Raksaka Dharma II, SL. Raksaka Dharma III, SL. Seroja, SL. SNC Kamboja, SL. Srilanka, SL. Kesetiaan XXXII Tahun, Tanda Kehormatan Satria Lencana Dharma Bantala, Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Nararya, Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama.

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA INDONESIA

Pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Strategi dalam sistem pertahanan negara Indonesia memiliki tiga fungsi, yakni fungsi penangkalan, fungsi penindakan, dan fungsi pemulihan.

Buku Strategi Pertahanan Negara ini disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu agar pembaca dapat memahami apa makna dan tujuan strategi pertahanan negara Indonesia dipelajari sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Buku ini dilengkapi dan didukung dengan sumber-sumber referensi yang memadai, berkualitas dan disusun dengan menggunakan teori elaborasi sehingga mudah dipahami secara teoritik dan mudah diterjemahkan dalam konteks kegiatan sehari-hari.



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id
🌐 www.madzamedia.co.id
📱 @madzamedia

